



**DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN  
DI PROVINSI JAMBI WILAYAH BARAT DAN TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**MUHAMMAD LUTFI**

**C1A018211**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI  
2025**

## **TANDA PERSETUJUAN**

Dengan ini, Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Muhammad Lutfi  
Nomor Mahasiswa : C1A018211  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jambi Wilayah Barat dan Timur

Telah disetujui dan disyahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku untuk diuji pada ujian komprehensif dan ujian skripsi pada tanggal yang tertera dibawah ini.

Jambi, Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Yulmardi, S.E., M.S  
NIP. 19590604 198603 1 002

Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si  
NIP. 19830524 200604 1 002

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si  
NIP. 196801241993032001

## **KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

i

Nama : Muhammad Lutfi  
Nomor Mahasiswa : C1A018211  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jambi  
Wilayah Barat dan Timur

Dengan ini saya menyatakan :

1. Pertama-tama, saya satu-satunya penulis skripsi ini; tidak ada orang lain yang berkontribusi dalam persiapannya. Tidak ada karya yang pernah dilakukan pengajuan ke suatu perguruan tinggi dalam mendapatkan gelar sarjana, dan juga tidak terdapat karya atau pandangan yang pernah dibuat atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali jika dicantumkan secara tertulis dalam dokumen ini dan terdaftar di referensi.
2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat fakta-fakta yang tidak sesuai dengan pernyataan saya, maka saya bersedia dikenakan hukuman berupa pencabutan Indeks Prestasi Akademik saya..

Jambi, Maret 2025  
Yang menyatakan,

Muhammad Lutfi  
C1A018211

## **TANDA PENGESAHAN**

ii

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan .....a Penguji dalam Ujian Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Maret 2025  
Jam : 10.00 – 12.00 Wib  
Tempat : Ruang Ujian 3 Dekanat

#### **PANITIA PENGUJI**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Prof. Dr. Drs. H. Zulgani, M.P	
Sekretaris Penguji	Dwi Hastuti, S.E., M.Sc	
Penguji Utama	Dr. Hj. Erni Achmad, S.E., M.Si	
Anggota Penguji	Prof. Dr. H. Yulmardi, S.E., M.S	
Anggota Penguji	Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si	

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si  
NIP. 19660301 199003 2 002

Dr. Rafiqi, MA  
NIP. 197802282005011003

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

iii

Penulis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT. Dengan anugerah-Nya, petunjuk-Nya, dan bimbingan-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jambi Wilayah Barat dan Timur”. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam pada kedua orang tua serta saudara-saudara kandung atas doa, dukungan, dan semangat yang begitu besar. Berkat semua itu, penulisan skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan atas segala bentuk pengorbanan luar biasa yang telah mereka lakukan demi keberhasilan penulis. Terimakasih telah mejadi penyemangat selama ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Etik Umiyati, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S., dan Pembimbing II, Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si, dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, atas nasihat, saran, dan bimbingan yang sangat berharga yang mereka berikan selama proses penelitian hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Para bapak dan ibu dosen program Ekonomi Pembangunan di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah membantu dan berbagi pengetahuan selama kuliah.
6. Bapak dan ibu karyawan Tata Usaha atau Sekretariat program Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang telah membantu dalam berbagai proses administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga saat ini.

7. Teman-teman terdekatku yang telah menemani dan memberi semangat serta doa kepada peneliti dari awal perkuliahan sampai pada saat ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebajikan dan mempermudah pekerjaan Anda, ibu, dan semua orang lain. Aamiin. Sebagai kesimpulan, penulis mengakui bahwa karya manusia tidak pernah sempurna karena setiap karya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelebihan dan kelemahan skripsi ini pasti ada, baik dari segi penyajian maupun aspek ilmiah. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk perbaikan di masa mendatang.

Jambi, Desember 2024

Penulis

**MUHAMMAD LUTFI**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Devian Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jambi Wilayah Barat (Studi Kasus: Kecamatan ...). Dibawah bimbingan Pembimbing 1 : Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S dan Pembimbing 2 : Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk menganalisis pertumbuhan tenaga

kerja, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, serta ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, sambil menilai dampak ketiga faktor tersebut terhadap ketidakmerataan pendapatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik, dengan metode analisis deskriptif kuantitatif dan regresi data panel. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tenaga kerja di kawasan Timur mencapai 1,70%, sedangkan di kawasan Barat sebesar 1,54%. Tingkat kemiskinan di kawasan Timur rata-rata berada di angka 8,92%, sedangkan di Barat 7,42%. Pertumbuhan ekonomi di Timur rata-rata mencapai 3,66% dan di Barat meraih 4,4%. Rasio Gini rata-rata di kedua kawasan tercatat masing-masing di angka 0,31. Analisis menunjukkan bahwa tenaga kerja dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan di kedua kawasan. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan, baik di kawasan Barat maupun Timur.

**Kata Kunci :** Tenaga Kerja, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan

### ***ABSTRACT***

*This research, entitled Determinants of Income Distribution Inequality in the Western and Eastern Regions of Jambi Province, was done under the supervision of Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S., and Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si. The study seeks to examine the evolution of labor, poverty, economic growth, and income disparity in the districts and cities of Jambi Province, while also*

*evaluating the effects of labor, poverty, and economic growth on income inequality.*

*The study utilizes secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and employs descriptive quantitative analysis with panel data regression as the analytical tool. The findings reveal that the average labor growth in the Eastern region is 1.70%, while in the Western region, it is 1.54%. The average poverty rate in the Eastern region stands at 8.92%, compared to 7.42% in the Western region. Economic growth averages 3.66% in the Eastern region and 4.4% in the Western region. Meanwhile, the Gini ratio averages 0.31 in both regions.*

*The analysis shows that labor and poverty significantly influence income inequality in both the Western and Eastern regions. However, economic growth does not have a significant effect on income inequality in either region.*

**Keywords:** *Labor, Poverty, Economic Growth and Income Inequality*

## DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ...	.....	
KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	vii	ii
TANDA PENGESAHAN.....		iii
KATA PENGANTAR .....		iv
ABSTRAK .....		vi

<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori .....	8
2.1.1 Ketimpangan .....	8
2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	10
2.1.3 Konsep Tenaga Kerja .....	13
2.1.4 Teori Kemiskinan .....	20
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi .....	36
2.2 Penelitian Sebelumnya .....	41
2.3 Kerangka Pemikiran .....	45
2.4 Hipotesis Penelitian .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	48
3.1.1 Jenis Data .....	48
3.1.2 Sumber Data .....	48
3.2 Metode Analisis Data .....	48
3.3 Alat Analisis Data .....	49
3.4 Operasional Variabel .....	54
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b> .....	<b>55</b>
4.1 Letak Geografis .....	55
4.2 Kependudukan .....	58
4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	59
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>61</b>
5.1 Pertumbuhan Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat Daya .....	61
5.1.1 Tenaga Kerja .....	61
5.1.2 Kemiskinan .....	63
5.1.3 Pertumbuhan Ekonomi .....	64

5.1.4	Ketimpangan Pendapatan.....	65
5.2	Pengaruh Tenaga kerja, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat .....	67
5.2.1	Estimasi Model FEM .....	69
5.2.2	Uji Hipotesis .....	72
5.3	Pengaruh Tenaga kerja, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur .....	74
5.3.1	Estimasi Model FEM .....	76
5.3.2	Uji Hipotesis .....	77
5.4	Analisis Ekonomi .....	79
5.4.1	Perkembangan Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat Dan Timur.....	79
5.4.2	Perkembangan Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat .....	80
5.4.3	Perkembangan Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur .....	81
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>83</b>
6.1	Kesimpulan .....	83
6.2	Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ketimpangan Pendapatan ; <sup>ix</sup> si Jambi wilayah Barat dan Provinsi Jambi Wilayah Timur Tahun 2020-2021 .....	5
Tabel 4.1	Luas, Ibukota dan Persentase wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2023 .....	56

Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Provinsi Jambi dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	58
Tabel 4.3	PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur dan Barat Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah) .....	59
Tabel 5.1	Perkembangan Tenaga kerja Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023 .....	61
Tabel 5.2	Tingkat kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023 .....	63
Tabel 5.3	Pertumbuhan ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023 .....	65
Tabel 5.4	Kondisi Gini Rasio Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023 .....	66
Tabel 5.5	Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM .....	68
Tabel 5.6	Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM .....	68
Tabel 5.7	Hasil Estimasi <i>Fixed Effects Model</i> (FEM) .....	69
Tabel 5.8	Fixed Effect Estimasi Model FEM .....	71
Tabel 5.9	Nilai t Statistik Pada Metode FEM .....	73
Tabel 5.10	Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM .....	74
Tabel 5.11	Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM .....	75
Tabel 5.12	Uji <i>Lagrange Multiplier</i> untuk memilih antara model PLS dengan REM.....	75
Tabel 5.13	Hasil Estimasi PLS .....	76
Tabel 5.14	Nilai t Statistik Pada Metode PLS .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kurva Permintaan Tenaga Kerja .....	20
Gambar 2.2.	Lingkaran Kemiskinan .....	20
Gambar 2.3.	Kerangka Pemikiran .....	46



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada masa orde baru, hasil-hasil pembangunan lebih terkonsentrasi di pulau jawa, sehingga pulau jawa menjadi lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, pada akhirnya timbul ketimpangan struktur ekonomi yang mencolok antar wilayah di Indonesia. Daerah yang relatif kaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Hal ini sangat jauh berbeda dengan daerah-daerah yang relatif miskin khususnya kawasan timur Indonesia (Rosmeli & Nurhayani, 2014).

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran setiap negara perlu meningkatkan pembangunan ekonomi didalamnya. Masalah besar yang pasti terjadi dan dihadapi setiap negara berkembang termasuk Indonesia ini dalam distribusi pendapatannya adalah kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Hal ini terjadi pada masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bukan hanya negara berkembang, negara maju juga menghadapi masalah ketimpangan ekonomi ini namun proporsi besar kecilnya ketimpangan yang ditemui adalah perbedaannya dan tingkat kesulitan mengatasi juga ditentukan oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Terjadinya pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah guna mencapai tujuan dalam meningkatkan distribusi pendapatan, Suryono (2010) menyatakan bahwa pendapatan perkapita suatu penduduk meningkat dalam waktu yang panjang adalah pembangunan ekonomi. Menurut Todaro & Smith (2013) untuk mengevaluasi distribusi pendapatan dapat dimulai dari 2 ukuran produk yakni distribusi fungsional dan distribusi pendapatan pribadi yang dapat mempertimbangkan pribadi sebagai totalitas yang berbeda. Dimana penduduk menerima pendapatan sebesar 40 persen, penduduk yang mempunyai penghasilan paling rendah 40 persen, dan penduduk yang mendapatkan penghasilan paling tinggi sebesar 20 persen.

Perbedaan penghasilan antara masyarakat ataupun daerah maju dengan daerah tertinggal merupakan akar permasalahan yang dikenal dengan istilah

ketimpangan distribusi pendapatan. Kian besarnya disparitas pendapatan alhasil kian besarnya pula keberagaman distribusi pendapatan, yang selanjutnya nantinya berkontribusi terhadap adanya kesenjangan ekonomi. Hal ini tidak dapat dicegah karena terdapat *trickle-down effect* yang terjadi ketika output terdistribusi secara menyeluruh. Hanya sedikit kelompok minoritas yang dapat memperoleh manfaat dari hasil produksi nasional, dan kelompok tersebut mempunyai tujuan tertentu. (Musfidar, 2012).

Beberapa metode umum untuk mengukur ketimpangan meliputi *Gini Ratio*, *Theil Index*, dan ukuran ketimpangan yang diterapkan oleh Bank Dunia. Dalam penelitian ini, Gini Ratio dipilih sebagai indikator ketimpangan. Gini Ratio yakni salah satu alat yang paling kerap dipergunakan dalam mengevaluasi ketimpangan, dengan nilai yang berkisar dari nol hingga satu, merepresentasikan tingkat ketimpangan agregat. Indeks Gini mencakup kesenjangan individu dan kolektif. Nilai nol pada Indeks Gini menunjukkan tidak adanya ketimpangan (kesetaraan sempurna), sedangkan nilai satu menunjukkan adanya disparitas sempurna.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi derajat kesenjangan yang ada di suatu tempat, dan salah satu upaya tersebut adalah dengan pertumbuhan perekonomian. Di sisi lain, ketimpangan tidak bisa dihilangkan seluruhnya; sebaliknya, jumlah tersebut hanya mampu dikurangi pada tingkatan tertentu dalam sistem sosial untuk menjamin adanya keselarasan pada proses pertambahan penduduk. Dapat dipastikan bahwa ketimpangan akan terus terjadi baik di negara-negara berkembang ataupun negara maju. Perbedaannya terletak pada besarnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada, serta besarnya ketimpangan yang akan dialami.

Akibat dari proses pembangunan yang mana ialah tahapan perubahan pada pembangunan itu sendiri, kesenjangan di suatu daerah merupakan akibat dari proses pembangunan tersebut. Kesenjangan pendapatan merupakan masalah penting lainnya yang harus diatasi agar suatu negara dapat mencapai kemajuan dalam pembangunannya. Hal ini terkait dengan distribusi uang yang diperoleh individu dalam suatu negara, dan inilah yang disebut dengan ketidakadilan pendapatan. Penyebaran pendapatan di dalam komunitas menjadi semakin tidak

seimbang saat tingkat perbedaan pendapatan semakin meningkat. Kesenjangan keseluruhan antara individu yang mempunyai tingkatan ekonomi relatif tinggi (kelompok kaya) dan individu yang berpenghasilan rendah (kelompok miskin) pada akhirnya akan semakin besar sebagai akibat dari keadaan ini.

Ketimpangan distribusi pendapatan dianalisis menggunakan metode indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Kian besarnya nilai indeks Gini, semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Sebaliknya, nilai indeks Gini yang lebih kecil mencerminkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Delapan faktor penting yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang, yang menjadi penyebab utama ketidakseimbangan dalam pembagian hasil ekonomi di wilayah tersebut:

1. Ekspansi populasi yang cepat, yang menyebabkan penurunan jumlah uang yang diperoleh setiap individu.
2. Inflasi, terjadi bilamana jumlah uang yang beredar meningkat namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah barang yang diproduksi sebanding.
3. Pertumbuhan yang tidak merata antar wilayah.
4. Investasi yang sangat besar pada proyek-proyek yang memerlukan modal dalam jumlah besar, yang menyebabkan tingginya proporsi pendapatan yang berasal dari peningkatan modal kerja dibandingkan dengan proporsi pendapatan yang bersumber dari tenaga kerja, yang pada gilirannya mengakibatkan kenaikan tarif.
5. Rendahnya mobilitas sosial menjadi faktor kelima.
6. Penerapan strategi industri yang menjadikan kenaikan harga produk industri dalam melindungi perusahaan-perusahaan kelas kapitalis memerlukan penerapan kebijakan industri substitusi impor.
7. Memburuknya nilai tukar mata uang negara berkembang pada perdagangan dengan negara maju, sebagai dampak dari inelastisitas permintaan komoditas ekspor NSB yang diungkapkan negara maju

8. Kegagalan usaha kerajinan rakyat sebagai contohnya pertukangan, industri rumah tangga, dan usaha lain yang sejenis.

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode Maret 2020 dan Maret 2021. Provinsi Jambi mengalami sedikit kenaikan Gini Ratio dari 0,320 menjadi 0,321. Kondisi di daerah perkotaan maupun perdesaan hampir sama artinya pada periode Maret 2020 – Maret 2021 ketimpangan pendapatan penduduk baik di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami sedikit perubahan kenaikan.

Gini Ratio merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang umum digunakan. Di Provinsi Jambi, Gini Ratio sedikit meningkat dari 0,320 pada Maret 2020 menjadi 0,321 pada Maret 2021, dengan pola serupa di perkotaan dan pedesaan. Selama 2019-2021, Gini Ratio di kabupaten/kota Jambi rata-rata berada di angka 0,30, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,36. Ketimpangan pendapatan ini diperkirakan dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi.

Wilayah Provinsi Jambi mencakup 11 kabupaten/kota dan berdasarkan posisi kewilayahan yang telah dijelaskan dari website [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id) (Pemerintah Provinsi Jambi, 2023) yang terdiri dari lima provinsi atau kota berbeda yang berlokasi di wilayah timur provinsi Jambi, yakni: Wilayah barat Provinsi Jambi mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Sarolangun, Bungo, Tebo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Daerah ini memiliki lahan pertanian dan perkebunan luas, didukung oleh fasilitas produksi kecil hingga menengah, yang secara signifikan menyumbang pada PDRB Provinsi Jambi. Sebagai perbandingan, wilayah timur hanya terdiri dari lima kabupaten/kota, termasuk Kota Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Muaro Jambi. Perbedaan jumlah wilayah dan karakteristik ekonomi ini menciptakan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Jambi.

**Tabel 1.1**

**Ketimpangan Pendapatan provinsi Jambi wilayah Barat dan Provinsi Jambi  
Wilayah Timur Tahun 2020-2021**

Wilayah Bagian	Kabupaten/Kota	Ketimpangan Pendapatan	
		2020	2021
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	0,28	0,28
	Merangin	0,32	0,29
	Sarolangun	0,31	0,32
	Tebo	0,3	0,3
	Bungo	0,31	0,3
	Sungai Penuh	0,31	0,31
	<b>Rata-Rata</b>	<b>0,31</b>	<b>0,30</b>
Jambi Wilayah Timur	Batanghari	0,32	0,31
	Muaro Jambi	0,28	0,32
	Tanjab Timur	0,25	0,25
	Tanjab Barat	0,2	0,25
	Kota Jambi	0,34	0,35
	<b>Rata-Rata</b>	<b>0,29</b>	<b>0,30</b>

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Melalui tabel 1.1 nampak bahwasanya terdapat perbedaan ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio pada Provinsi Jambi wilayah Timur dan Provinsi Jambi wilayah Barat. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jambi wilayah Timur memiliki Gini Rasio yang lebih baik dibanding Provinsi Jambi wilayah Barat pada tahun 2020.

Jika dilihat secara rata-rata bahwa tidak ada perbedaan yang jauh antar Provinsi Jambi wilayah timur dengan barat. Namun jika dilihat dari setiap wilayah kabupaten/kotanya terdapat fenomena dimana pada tahun 2020 angka ketimpangan pendapatan yang dilihat dari rasio gini pada wilayah Jambi Wilayah Barat lebih besar dibanding Jambi Wilayah Timur. Pada Jambi Wilayah Barat hanya 1 wilayah yang memiliki angka ketimpangan pendapatan di bawah 0,30

yaitu Kabupaten Kerinci. Namun untuk Jambi Wilayah Timur walaupun memiliki 3 wilayah dengan angka rasio gini dibawah 0,30, akan tetapi Kota Jambi memiliki rasio gini terbesar yaitu 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa Baik Provinsi Jambi wilayah Barat maupun wilayah Timur masing-masing tetap memiliki permasalahan ketimpangan pendapatan yang harusnya dapat dikurangi.

Menurut latar belakang tersebut maka peneliti berminat dalam mengangkat judul **“Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jambi Wilayah Barat dan Timur”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Ketimpangan distribusi pendapatan akibat tidak meratanya pelaksanaan pembangunan di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah akan menyebabkan semakin besarnya disparitas perekonomian. Ketimpangan ekonomi dapat kita lihat dengan mengamati semakin besarnya kesenjangan distribusi pendapatan di berbagai lapisan masyarakat dan wilayah. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh semakin besarnya kesenjangan distribusi pendapatan adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Berdasarkan gagasan yang dikemukakan di atas, hanya karena tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi tidak selalu berarti adanya keberhasilan dalam pembagian keuntungan. Berdasarkan informasi ini, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan tenaga kerja, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi?
2. Bagaimana tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan tenaga kerja, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah barat dan timur Provinsi Jambi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademisi

Hasil penelitian ini, yang menghubungkan pemahaman teoritis dari bangku kuliah dengan situasi nyata, dapat menjadi referensi sekaligus perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji isu serupa, khususnya terkait ketimpangan pendapatan.

2. Manfaat praktisi,

Temuan dari penelitian ini harapannya mampu berkontribusi atau masukan untuk pemerintah mengenai ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah barat dan timur di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi agar dapat mencari tahu keadaan perekonomian yang sedang berjalan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Ketimpangan**

Keadaan ketimpangan antara satu dengan yang lain inilah yang disebut dengan ketimpangan. Ketimpangan pembangunan masih terus terjadi antara negara maju dan negara berkembang saat ini. Negara maju unggul dalam kualitas sumber daya manusia, memungkinkan mereka mengelola kekayaan alamnya dengan cara yang efisien dan efektif. Sebaliknya, negara berkembang seringkali kekurangan tenaga kerja yang terampil, sehingga tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Negara-negara yang masih dalam proses mengembangkan perekonomiannya sering kali membeli barang jadi dari negara-negara kaya. Oleh karena itu, data mengenai impor negara berkembang seringkali lebih besar dibandingkan data ekspornya. Akibatnya, hal ini seringkali menyebabkan defisit neraca perdagangan negara-negara berkembang.

Terdapat disparitas pendapatan yang signifikan antara negara berkembang dan negara maju sebagai akibat dari fenomena ini, yang semakin menguntungkan negara maju. Hipotesis kesenjangan pendapatan yang dikemukakan oleh Arsyad (2010) pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan permasalahan mendasar yang perlu diatasi agar pembangunan berhasil.

Arsyad (2010) menjelaskan bahwa penting untuk memiliki keseimbangan secara keseluruhan antara sektor-sektor primer, sekunder, tersier, dan sosial dalam suatu negara, area, atau tempat di mana suatu peristiwa terjadi, yang dikenal dengan istilah "keharmonisan kawasan". Meskipun ada negara yang berkembang dan ada pula yang sudah maju, baik yang berorientasi pada pertanian maupun industri, serta baik negara yang besar maupun kecil, terdapat negara-negara yang ekonominya berkembang pesat sementara yang lainnya tidak. Sangat penting untuk mengaitkan pola pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbagai faktor fisik serta sosial ekonomi agar kita dapat menentukan faktor mana yang paling

berpengaruh pada pola pertumbuhan tersebut. Ketidakseimbangan ini tidak terjadi di semua wilayah dengan tingkat yang sama. Masih terdapat beberapa aspek umum yang dapat disimpulkan. Faktor pendukung utama dari ketidakseimbangan ini adalah:

- a. Faktor Geografis. Di area yang sangat luas, penyebaran sumber daya global, sumber energi, hasil pertanian, bentuk permukaan tanah, cuaca, dan jumlah curah hujan tidak merata. Dengan anggapan faktor-faktor lainnya konsisten, semakin baik kondisi geografis suatu tempat, semakin baik pula kemajuan kawasan itu.
- b. Faktor Sejarah: Derajat kemajuan masyarakat dipengaruhi oleh sejarah ekonomi yang telah terjadi, yang menciptakan dorongan bagi karyawan dan pengusaha. Sistem feodal cenderung tidak mendorong kerja keras, sedangkan sistem industri yang mengeksploitasi pekerja tanpa perencanaan justru menghambat kemajuan.
- c. Faktor Politik: Ketidakpastian dalam politik dapat menjadi penghalang signifikan bagi kemajuan. Sebuah pemerintahan yang kuat namun tidak memiliki kekuatan, korup, dan tidak mampu mengatasi kepentingan pribadi atau tekanan sosial akan menggagalkan kebijakan pembangunan.
- d. Faktor Kebijakan Pemerintah: Negara maju umumnya menerapkan konsep negara kesejahteraan yang berfokus pada pemerataan regional. Mereka menghilangkan efek negatif pasar seperti "*backwash*" dan mendukung efek positif. Sebaliknya, negara miskin masih minim kebijakan serupa.
- e. Faktor Administrasi (Birokrasi), efisiensi atau ketidakefisienan dalam administrasi sangat membawa dampak terhadap peningkatan ketimpangan antar wilayah. Pemerintah memerlukan tenaga administrasi yang jujur, terdidik, terlatih, dan efisien untuk menjalankan fungsinya. Birokrasi yang efisien akan mendukung keberhasilan pembangunan regional, sementara birokrasi yang tidak efisien akan menghambatnya.
- f. Faktor sosial. Ada beberapa elemen masyarakat yang dapat menjadi penghambat kemajuan. Di daerah yang dianggap tertinggal, penduduknya mempunyai institusi dan keinginan (sikap) yang mendukung pertumbuhan

perekonomian. Orang-orang yang tinggal di wilayah yang lebih berkembang memiliki lembaga dan harapan yang mendorong kemajuan.

- g. Faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya perekonomian, seperti perbedaan faktor-faktor produksi, proses akumulasi berbagai faktor, rendahnya kekuatan pasar, pengaruh “*backwash*” dan pengaruh penyebaran, serta adanya pasar yang tidak murni. tidak berjalan mulus, dan cenderung lebih efisien dalam pembangunan ekonomi.

### **2.1.2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Pengertian ketimpangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan segala sesuatu yang tidak seperti mestinya, misalnya tidak adil atau tidak patut. Selama ini pendapatan diartikan sebagai penjumlahan keseluruhan pendapatan yang dikumpulkan baik dari sektor formal ataupun nonformal, diukur dalam jangka waktu tertentu (Astuti, 2015)

Hal ini perlu diatasi karena ketimpangan regional yang ekstrim mengakibatkan inefisiensi perekonomian, inefisiensi alokasi aset, dan peningkatan jumlah kemiskinan, peningkatan stabilitas dan solidaritas sosial, inefisiensi, serta penguatan kekuatan politik kelompok kaya. yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Ketimpangan adalah sesuatu yang perlu diatasi (Todaro & Smith, 2013).

Istilah “ketimpangan pendapatan” mengacu pada keadaan di mana distribusi uang yang diberikan kepada masyarakat tidak didistribusikan secara merata. Beberapa unsur yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara lain tingkat pembangunan, adanya heterogenitas etnis, dan ketimpangan. Hubungan juga dapat terlihat antara ketidaksetaraan dan kediktatoran serta pemerintahan, yang semuanya berdedikasi untuk menjaga keselamatan angkatan bersenjata mereka. (Sukirno, 2013).

Hajiji (2010) berpendapat bahwa distribusi uang yang tidak merata akan merugikan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali pendapatan tentu saja akan memakan biaya yang besar. Hal ini karena ketimpangan menciptakan kebijakan-kebijakan tersebut. Distribusi pendapatan bisa saja berbentuk pemerataan atau ketimpangan, yang merupakan

konsep yang mencerminkan sejauh mana aktivitas yang berbeda menghasilkan jumlah uang yang berbeda. Setelah perolehan pendapatan dari usaha komersial, terjadi distribusi hasil proses manufaktur.

Distribusi pendapatan memberi gambaran sejauh mana ketimpangan atau pemerataan hasil pembangunan tercapai di sebuah wilayah atau negara, baik yang diterima oleh individu maupun yang berasal dari kepemilikan faktor produksi di masyarakat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, baik di negara maju ataupun berkembang, dan selalu menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius. Realitas tersebut diidentikkan dengan ketimpangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan. Sejak tahun tujuh puluhan, masalah kesenjangan telah menjadi topik perdebatan utama di negara-negara berkembang ketika menyangkut penentuan kebijakan (Putra, 2011)

Ada sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Faktor-faktor tersebut meliputi pertumbuhan dan kendala masing-masing wilayah, serta kecenderungan pembangunan yang terkonsentrasi pada tempat-tempat yang sudah mapan. Oleh karena itu, terdapat pola ketimpangan distribusi penghasilan antar daerah, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang turut mengakibatkan semakin besarnya disparitas distribusi pendapatan antar daerah (Retnosari, 2012)

Dalam suatu negara, distribusi pendapatan nasional merupakan cerminan sejauh mana hasil kemajuan negara tersebut didistribusikan kepada masyarakatnya, baik merata maupun tidak merata (Dwi, 2010). Distribusi pendapatan dapat dibagi menjadi dua ukuran utama: distribusi ukuran, yang mengacu pada proporsi uang yang diterima setiap individu, dan distribusi fungsional, yang mengacu pada distribusi kepemilikan komponen produksi (Dwi, 2010).

Secara umum, distribusi pendapatan mengacu pada cara pendapatan dibagikan di antara individu atau keluarga dalam suatu komunitas. Ketidakmerataan adalah suatu hal yang sering terjadi dalam ekonomi suatu daerah. Ketidakmerataan ini bisa muncul karena variasi dalam sumber daya alam dan perbedaan jumlah penduduk di berbagai daerah. Oleh karena itu, di setiap

daerah ada daerah maju dan daerah tertinggal. Ketimpangan mengacu pada taraf hidup dibandingkan masyarakat, karena adanya perbedaan antara wilayah yang disebabkan oleh berbagai faktor awal yang unggul. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki tingkat kemajuan yang berbeda. Ini menghasilkan GAP atau ketidaksetaraan dalam kesejahteraan di suatu daerah (Kuncoro, 2012). Menurut Sukirno (2013), pengaruh distribusi pendapatan pada dasarnya berkaitan dengan cara pendapatan individu atau rumah tangga tersebar dalam masyarakat. Dua konsep utama untuk mengevaluasi distribusi pendapatan adalah ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Pertidaksamaan absolut adalah cara untuk mengukur ketimpangan melalui parameter dengan nilai konstan (Sukirno, 2013). Secara bersamaan, gagasan ketidaksetaraan relatif menilai alokasi kekayaan yang berbeda dengan menyandingkan pendapatan individu atau kelompok tertentu dengan pendapatan agregat seluruh masyarakat (Sukirno, 2013). Ketidaksetaraan distribusi pendapatan berkaitan dengan kesenjangan antar komunitas atau antara daerah yang lebih maju dan yang tetap kurang beruntung. Ketimpangan pendapatan yang lebih besar sesuai dengan distribusi pendapatan yang lebih luas. Ketidakmerataan distribusi pendapatan berakibat pada ketidaksetaraan wilayah. Fenomena ini tidak bisa dihindari karena hasil produksi domestik tidak merata di antara masyarakat dan seringkali tidak optimal. Hasil produktif suatu negara hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil individu yang memiliki tujuan tertentu (Musfidar, 2012). Menurut Adelman dan Morris (Arsyad, 2010) menjelaskan delapan faktor yang memicu ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang.

1. Terdapat hubungan antara pertumbuhan populasi yang besar dengan penurunan pendapatan per orang.
2. Inflasi, terjadi apabila jumlah uang yang beredar meningkat meskipun demikian tidak dibarengi dengan kenaikan jumlah produk yang dihasilkan sebanding
3. Kesenjangan pembangunan di berbagai bidang
4. Melakukan investasi dalam jumlah besar pada proyek-proyek modal (padat modal) untuk meningkatkan proporsi pendapatan modal yang

diperoleh dari aset dibandingkan dengan proporsi pendapatan yang diperoleh dari sumber lain, sehingga menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran.

5. Mobilitas sosial yang rendah menjadi faktor kelima.
6. Penerapan strategi substitusi industri impor yang berujung pada kenaikan harga produk yang dihasilkan untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelas kapitalis
7. Karena ketidakstabilan permintaan dari negara-negara berkembang untuk barang-barang ekspor, nilai tukar negara-negara ini cenderung meningkat saat mereka bertransaksi dengan negara-negara maju.
8. kegagalan dalam usaha kerajinan masyarakat, seperti pertukangan, industri rumahan, dan jenis usaha lainnya yang serupa.

### **2.1.3. Konsep Tenaga Kerja**

UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mencakup segala hal yang berkaitan dengan pekerja sebelum, selama, dan setelah periode kerja mereka. Menurut Soepomo (2010), ketenagakerjaan atau usaha kerja adalah sekumpulan yang meliputi tulisan dan lisan, yang berkaitan dengan situasi saat seseorang bekerja untuk orang lain dan menerima imbalan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan tenaga kerja sebagai mereka yang berusia 15 tahun ke atas yang dapat berkontribusi pada penciptaan komoditas atau jasa untuk kepentingan pribadi dan komunal. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 04/MEN/1994, pekerja adalah individu yang dipekerjakan perusahaan tetapi belum diwajibkan mengikuti jaminan sosial secara langsung, karena penerapannya bertahap. Sejak SAKERNAS 2001, batas usia tenaga kerja disesuaikan menjadi 15 tahun ke atas, sesuai standar ILO. (Organisasi Perburuhan Internasional).

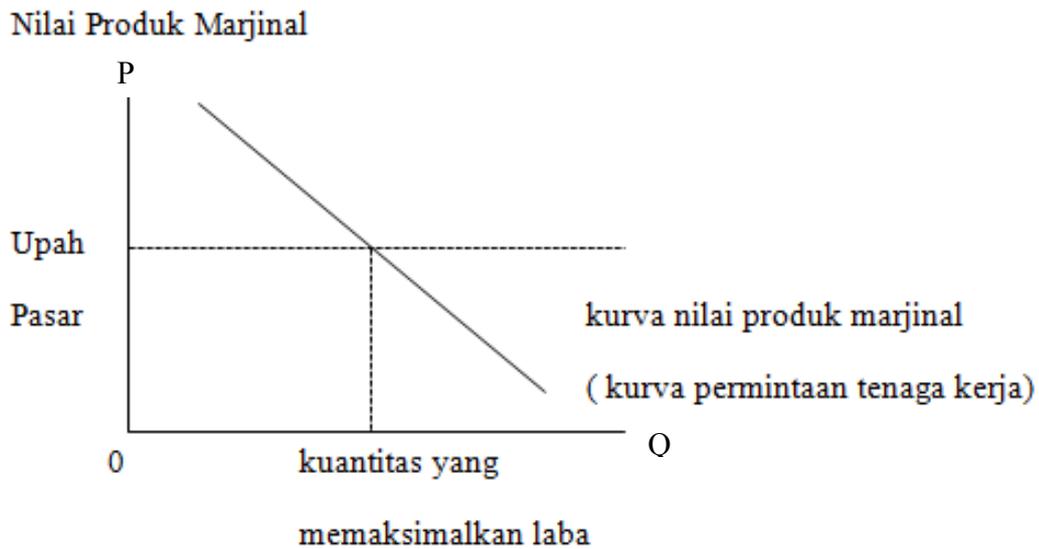
Menurut Badan Pusat Statistik, angkatan kerja mencakup individu yang berusia 15 tahun ke atas, baik yang aktif bekerja, yang memiliki pekerjaan namun sedang mengalami masa pengangguran sementara, ataupun yang sedang mencari pekerjaan dan siap bekerja. Secara luas, tenaga kerja dianggap sebagai elemen penting yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi

masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengukuran produktivitas dan pengukuran pendapatan per kapita, jumlah penduduk Indonesia yang besar akan menjadi faktor penentu percepatan laju pembangunan ekonomi. Selain itu, penyerapan tenaga kerja ialah sumber daya yang dipergunakan pada proses pelaksanaan proses produksi maupun distribusi produk dan jasa (Sumarsono, 2009).

Teori permintaan tenaga kerja merupakan hipotesis yang mencoba menjelaskan jumlah bisnis yang akan mempekerjakan pekerja pada tingkat gaji yang berbeda dan pada jangka waktu tertentu. Penting untuk dicatat bahwasanya permintaan akan produk dan jasa berbeda dengan permintaan akan tenaga kerja. Seperti yang diungkapkan organisasi tersebut, besarnya permintaan tenaga kerja berbanding lurus dengan besarnya permintaan produk dan jasa di kalangan masyarakat umum. Atas dasar ini, kebutuhan akan tenaga kerja merupakan contoh permintaan turunan. Langkah pertama pada proses produksi yang mempunyai pengaruh pada permintaan tenaga kerja adalah turunnya upah pasar. Atas dasar ini, fakta bahwa penurunan gaji pasar akan mengakibatkan penurunan biaya produksi organisasi (Afrida, 2011)

Jika harga produk diasumsikan tidak berubah dalam pasar persaingan sempurna, maka penurunan biaya tersebut akan mengakibatkan peningkatan jumlah produksi, yang nantinya akan menambah keuntungan. Atas dasar tersebut, korporasi akan menambah jumlah tenaga kerja yang digunakannya. Merekrut orang hingga nilai output marjinal tenaga kerja sama dengan gaji adalah sesuatu yang akan diprioritaskan oleh perusahaan kompetitif yang berusaha memaksimalkan keuntungan (Mankiw, 2013).

Menurut teori mikroekonomi, permintaan didefinisikan menjadi keinginan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk pada kisaran harga yang berbeda dan pada jangka waktu tertentu. Hubungan dengan tenaga kerja yakni kaitan antara tingkat gaji dengan jumlah tenaga kerja yang diinginkan pengusaha pada setiap tingkat upah yang layak pada jangka waktu tertentu selama pengusaha menjalankan usahanya. Representasi kurva permintaan tenaga kerja mampu diamati pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja**

*Sumber : Mankiw, (2013)*

Kurva diatas menunjukkan nilai produk marjinal secara grafis. Garis kurvanya mengarah kebawah karena menurunnya produk marjinal tenaga kerja seiring dengan bertambahnya jumlah pekerja. Kurva diatas juga menarik garis horizontal yang memperlihatkan upah pasar dalam memaksimalkan laba, perusahaan hanya akan merekrut pekerja sampai pada suatu titik dimana kedua garis tersebut berpotongan.

Penyerapan tenaga kerja terjadi ketika nilai produk marjinal pekerja setara dengan upah. Jika di bawah titik ini, tambahan pekerja meningkatkan laba perusahaan; jika di atas, laba tidak bertambah. Kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan kuantitas pekerja yang dicari dalam kaitannya dengan tingkat upah pasar yang berlaku. Penyerapan tenaga kerja menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena pertumbuhan penduduk melampaui ketersediaan lapangan kerja. Dalam pembangunan ekonomi, tenaga kerja penting sebagai sumber pendapatan individu dan kontribusi terhadap PDB. Oleh karena itu, GBHN menekankan peningkatan produksi nasional sekaligus perluasan lapangan kerja, yang memiliki manfaat ekonomi dan nilai kemanusiaan.

Menurut Sumarsono (2009), konsep elastisitas permintaan tenaga kerja mengukur sejauh mana perubahan upah mengikuti perubahan permintaan tenaga

kerja sebesar satu persen, dan ini dikenal sebagai penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah pekerja yang diterima tidak hanya akan memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan, tetapi juga akan berkontribusi pada berkurangnya perbedaan yang ada di antara berbagai kelompok masyarakat. Sebaliknya bilamana jumlah penduduk yang bekerja dalam jumlah besar dan tidak diikuti dengan penyerapan angkatan kerja yang meluas, maka hal ini tentu akan menjadi beban bagi pertumbuhan negara. Dampak dari hal ini adalah peningkatan persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan, yang juga akan berdampak pada pendapatan per orang di suatu komunitas.

Memperluas penyerapan tenaga kerja hanya dapat dicapai melalui perluasan kegiatan ekonomi fundamental; Namun perluasan basis ekonomi tersebut harus didukung oleh upaya peningkatan produktivitas, baik pada sektor kegiatan baru maupun lama. Perluasan penyerapan tenaga kerja merupakan satu-satunya cara untuk melakukan hal tersebut. Salah satu alasan mengapa suatu negara menghambat produksi di negara berkembang adalah rendahnya produktivitas, yang disertai dengan kurangnya pemanfaatan tenaga kerja secara penuh. Inilah alasan mengapa hal ini terjadi. Melalui pernyataan tersebut mampu disimpulkan bahwasanya peningkatan penyerapan tenaga kerja hanya dapat dicapai melalui peningkatan aktivitas ekonomi yang disertai dengan produktivitas pekerja yang tinggi. Hal ini akan memungkinkan tercapainya pemerataan penyerapan tenaga kerja ke seluruh penduduk.

Melalui proses penyerapan tenaga kerja, individu dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui uang tunai yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka. Melibatkan pekerja dalam kegiatan ekonomi dan mendorong ekspansi ekonomi merupakan langkah-langkah yang dibutuhkan guna meraih tujuan ini. Sebab individu mempunyai kecenderungan untuk membelanjakan lebih banyak untuk kebutuhannya ketika pendapatannya meningkat dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya. Karena itu, berpotensi memperluas pasar produk dan jasa. Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, strategi yang dibutuhkan meliputi: (1) Pasokan tenaga kerja: (a) Pengendalian populasi jangka panjang; (b) Pengendalian angkatan kerja jangka pendek dengan memperbaiki pendidikan,

baik dari kuantitas (perluasan sarana, mengurangi putus sekolah, meningkatkan usia wajib belajar) maupun kualitas (peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja); (c) Pemerataan infrastruktur untuk mengurangi migrasi desa-ke-kota. (2) Kebutuhan tenaga kerja: (a) Perluasan penyerapan tenaga kerja melalui kebijakan makro (investasi, sistem pajak, kredit untuk sektor riil), kebijakan regional (pembangunan infrastruktur), dan kebijakan sektoral (penguatan koperasi dan UKM di sektor pertanian, penyederhanaan investasi di sektor industri), serta kebijakan khusus (program untuk wanita di desa, perluasan penyerapan tenaga kerja di desa, pengembangan sistem *link and match*).

Setelah mempertimbangkan beragam faktor tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya cara terbaik untuk menawarkan penyerapan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang sudah ada yakni dengan memperluas penyerapan tenaga kerja dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas di semua sektor ekonomi. yang sudah ada di tempatnya.

Hal ini diharapkan dapat berdampak pada penurunan derajat kemiskinan di daerah-daerah yang tingkat penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Sebaliknya jika tingkat penyerapan tenaga kerja rendah alhasil kemiskinan nantinya kian mengalami peningkatan. Tingkat penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh sejumlah komponen utama, dan sifat komponen-komponen tersebut berbeda-beda di setiap negara. Berdasarkan pemaparan (Simanjuntak, 2005) faktor yang mempengaruhi Penyerapan tenaga kerja, yakni:

a) Situasi perekonomian saat ini

Pentingnya memiliki unsur-unsur produksi yang tinggi, termasuk tenaga kerja, agar mempunyai tingkat kapasitas produksi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena perekonomian suatu daerah ditandai dengan tingginya tingkat aktivitas produksi. Ada banyak perusahaan yang mencari pekerja baru.

b) Pertumbuhan Pelanggan

Laju pertumbuhan penduduk akan mendatangkan dampak pada kualitas pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan terjadi pada tahun ini. Dengan

demikian, jumlah penduduk yang bersedia bekerja akan semakin bertambah, yang berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk yang mampu bekerja.

c) Nilai barang yang dihasilkan oleh manusia

Ketersediaan lapangan kerja yang tinggi akan difasilitasi oleh tingginya tingkat produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, sedangkan ketersediaan sumber daya manusia yang kualitasnya buruk akan mempersulit perolehan pekerjaan yang diinginkan.

d) Tingkatan Upah Kenaikan gaji yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi dapat mengakibatkan pelaku usaha meminimalisir jumlah tenaga kerja, yang pada akhirnya membawa dampak pada berkurangnya jumlah tenaga kerja yang benar-benar terserap oleh perusahaan..

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Rahardja dan Manurung pada tahun 2006, ada beberapa elemen yang memengaruhi peluang kerja, yaitu:

a) Biaya Faktor Produksi

Upah atau gaji seorang pekerja adalah apa yang disebut dengan "biaya faktor produksi". Terdapat hubungan langsung antara tarif pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

b) Permintaan atas Hasil

Seiring dengan bertambahnya jumlah produksi, kebutuhan akan pekerjaan juga akan semakin meningkat. Jika konsep ini diterapkan pada lembaga pendidikan, hal tersebut memperlihatkan bahwasanya kebutuhan tenaga kerja seperti tenaga pengajar dan individu lainnya akan meningkat sebanding dengan jumlah siswa atau individu yang terdaftar di kelas

a) Permintaan terhadap Faktor Produksi Lain

Sebagai contoh, jika terjadi peningkatan permintaan atas unsur-unsur produksi alternatif (mesin), maka kebutuhan akan tenaga kerja akan berkurang. Jika terdapat hubungan dua arah antara tenaga kerja dan mesin,

maka peningkatan permintaan mesin akan mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja.

b) Kemajuan Teknologi

Terdapat korelasi positif antara kemajuan teknologi dengan kebutuhan komponen produksi. Dalam artian peningkatan atau penurunan permintaan unsur-unsur produksi dapat disebabkan oleh kemajuan. Jika kemajuan teknologi akan menyebabkan peningkatan produktivitas, maka kebutuhan akan unsur-unsur produksi akan semakin besar. Kemajuan teknologi yang membutuhkan modal dalam jumlah besar meningkatkan produktivitas produk modal, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang-barang tersebut. Sebaliknya jika hubungan antara kedua kegiatan tersebut bersifat substitusi, maka perkembangan tersebut akan mengakibatkan penurunan permintaan tenaga kerja. Perkembangan teknologi berpotensi menambah permintaan tenaga kerja, asalkan perkembangan tersebut juga memperbanyak produktivitas kerja.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada Penyerapan tenaga kerja diantaranya:

- 1) potensi tergantikannya tenaga kerja dengan sektor produksi lain, sebagai contohnya modal
- 2) Elastisitas permintaan pada produk yang diproduksi
- 3) Persentase total biaya produksi yang disebabkan oleh biaya karyawan
- 4) Derajat elastisitas penawaran komponen produksi lain yang saling melengkapi

Dalam menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu mempergunakan rumus seperti berikut:

$$TPAK = \frac{AK}{PUK} \times 100\% \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

TPAK = Tingkat partisipasi angkatan kerja

AK = Angkatan Kerja

PUK = Penduduk Usia Kerja (TK)

#### **2.1.4. Teori Kemiskinan**

Menurut Haughton dan Khander (2012), orang yang tidak dikategorikan sebagai miskin dapat dengan mudah jatuh ke dalam kemiskinan jika dihadapkan pada situasi sulit, seperti krisis finansial atau penurunan harga barang pertanian. Kemiskinan selalu berhubungan dengan kesenjangan serta ketidakstabilan. Orang yang sebelumnya tidak dianggap miskin dapat tiba-tiba mengalami kemiskinan. Kerentanan memengaruhi tindakan individu terkait investasi, pola produksi, serta metode yang tepat, dan juga pandangan mereka terhadap kondisi pribadi. Oleh karena itu, kerentanan merupakan elemen kunci dalam menentukan kesejahteraan seseorang. Kerentanan ini memengaruhi perspektif individu tentang posisi mereka sendiri. Beberapa pendapat mengenai kemiskinan, antara lain Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) dalam (Mustika et al., 2023) memandang kemiskinan sebagai kondisi lemahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang diukur dengan indikator-indikator tertentu dan bila dibandingkan dengan negara lain, hubungan relatif antara negara kaya dan negara miskin.

Menurut Jhingan (2016) Ada sejumlah faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kemiskinan, termasuk keterbelakangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Permasalahan kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan permasalahan pembangunan lainnya, seperti permasalahan lingkungan, kualitas sumber daya manusia, kelangkaan sumber pembiayaan pembangunan, keterbatasan investasi, ketidakberdayaan petani, rendahnya kontribusi nilai tambah pertanian terhadap PDB, fluktuasi harga produk pertanian primer hingga permasalahan lain seperti stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Begitu kompleksnya permasalahan kemiskinan tersebut, sehingga agenda penanggulangan kemiskinan dari waktu ke waktu belum dapat diselesaikan secara memadai (Zulgani et al., 2018).

Menurut Yacaoub (2012) Karena kemiskinan mencakup kebutuhan hidup yang paling esensial, maka kemiskinan dianggap sebagai salah satu kesulitan yang paling mendasar. Selain itu, Kemiskinan menjadi isu mendunia karena tantangan ini dialami oleh berbagai negara di seluruh penjuru dunia.

Purnamawati, (2021) memaparkan faktor kemiskinan dari sistem ekonomi, yaitu:

- (1) pada tingkat mikro terdapat kesenjangan kualitas sumber daya manusia,
- (2) terdapat perbedaan akses pada permodalan, dan

(3) terdapat kesenjangan distribusi pendapatan. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh pola kepemilikan sumber daya yang berbeda, yang pada akhirnya menyebabkan distribusi pendapatan tidak seimbang. Salah satu penyebab utama yang berkontribusi pada kemiskinan di Indonesia adalah sedikitnya pilihan atau kesempatan yang dimiliki seseorang dalam hal perkembangan. (Purnamawati, 2021).

Sebab-sebab yang menghalangi kelompok berpenghasilan rendah di Indonesia untuk mendapatkan akses ke sumber daya pembangunan (Purnamawati, 2021) mencakup: (1) adanya struktur ekonomi dan politik yang cenderung otoriter dan kurang mendukung kelompok yang kurang beruntung, (2) terbentuknya sistem ekonomi dan politik yang berdampak pada insentif kelembagaan yang mendorong perilaku mencari keuntungan, bersifat otoriter; dan terpusat.

Purnamawati (2021) menyoroti bahwa berbagai penyebab berkontribusi terhadap kesenjangan tingkat kemiskinan di seluruh negara berkembang. Variabel tersebut mencakup (1) variasi kondisi geografis, ukuran populasi, dan tingkat pendapatan; (2) kesenjangan historis, terutama yang diakibatkan oleh penjajahan oleh kekuatan yang berbeda; dan (3) perbedaan kualitas dan kelimpahan sumber daya alam. Faktor-faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan meliputi: (1) peran sektor swasta dan pemerintah yang berbeda; (2) struktur industri yang bervariasi; (3) tingkat ketergantungan yang berbeda pada pengaruh ekonomi dan politik negara lain; dan (4) kesenjangan dalam lembaga domestik, kerangka politik, dan distribusi kekuasaan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan. Namun kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi

pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas (Nasution, Yulmardi & Hardiani, 2018).

Dengan demikian berkesimpulan bahwasanya kemiskinan yakni situasi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya berdasarkan kriteria-kriteria yang telah dikemukakan di atas. Pada dasarnya kemiskinan mampu diamati melalui dua perspektif yang berbeda, yaitu sebagai berikut: (Andriani & Sukmawati, 2022):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merujuk pada keadaan di mana pendapatan seseorang hanya cukup atau bahkan kurang dalam mencukupi kebutuhan dasar yang mendasar, sebagai contohnya makanan, sandang, dan papan, sehingga dianggap tidak layak secara hidup. Tingkat kemiskinan ini ditentukan dengan membandingkan pendapatan individu dengan garis kemiskinan yang mencerminkan kebutuhan minimum untuk bertahan hidup. Jika pendapatan seseorang berada di bawah garis ini, mereka dianggap berada dalam kemiskinan absolut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada April 2016, garis kemiskinan di DIY bernilai Rp354.000 per kapita per bulan..

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif muncul ketika individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi taraf hidupnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Sekian besarnya kesenjangan penghasilan antara kelas atas dan bawah, semakin banyak individu yang masuk kategori ini. Dengan demikian, distribusi pendapatan berperan penting dalam memahami kemiskinan relatif.

Padriyansyah & Syahputera (2022) memaparkan bahwasanya kemiskinan mampu diklasifikasikan atas empat, yakni:

1. *Persistent poverty*, yang sering disebut dengan kemiskinan yang sudah ada sejak lama atau diturunkan.

2. *Cyclical poverty*, atau kemiskinan yang mempunyai pola yang konsisten dengan siklus perekonomian yang lebih luas
3. *Seasonal poverty*, disebut juga kemiskinan musiman, yaitu jenis kemiskinan yang sering terjadi pada sektor pertanian dan perikanan.
4. *Accident poverty*, Kemiskinan yang terjadi dikarenakan faktor seperti bencana alam, konflik bersenjata, tindakan kekerasan, atau kebijakan tertentu yang mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan individu dalam suatu komunitas.

Didasarkan atas (Badan Pusat Statistik, 2020) ciri-ciri kemiskinan itu mencakup :

- a. Ketidakkampuan dalam mencukupi kebutuhan konsumsi yang mendasar, sebagai contohnya tempat tinggal, pakaian, dan makanan.
- b. Ketiadaan akses pada kebutuhan hidup dasar lainnya sebagai contohnya
  - a) Air bersih
  - b) Transportasi
  - c) Kesehatan
  - d) Pendidikan
  - e) Sanitasi
- c. Dikarenakan tidak terdapat investasi pada pendidikan dan keluarga, maka tidak ada kemungkinan untuk mencapai tingkat keamanan apa pun di masa depan.
- d. Kerentanan terhadap kejutan baik secara individu maupun kolektif
- e. Terbatasnya mutu tenaga kerja yang ada dan jumlah sumber daya alam yang sedikit.
- f. Partisipasi pada kegiatan sosial kelompok dalam masyarakat
- g. Kurangnya akses terhadap peluang kerja dan penghidupan yang berkelanjutan.
- h. Disabilitas yang menghalangi seseorang untuk bekerja karena cacat fisik atau mental

- i. Anak-anak yang tidak terawat, wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, janda yang hidup dalam kemiskinan, serta komunitas yang tertekan dan terabaikan secara lokasi adalah contoh individu yang mengalami kerugian sosial dan memiliki keterbatasan.

Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistik (2020) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Rata-rata, luas lantai suatu bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk setiap individu.
2. Lantai rumah terbuat dari lumpur, bambu, atau kayu murah.
3. Bambu, jerami, kayu kualitas rendah, dan dinding yang tidak diberi plester merupakan jenis dinding hunian yang tersedia.
4. Jangan berbagi fasilitas tinja dengan rumah lain atau mempunyai toilet sendiri.
5. Rumah tangga menggunakan sumber penerangan yang tidak mengandalkan energi.
6. Sumber air minum dapat berasal dari sumur, mata air yang terlihat, aliran sungai, atau air yang terjatuh dari hujan.
7. Kayu, briket arang, dan minyak digunakan sebagai sumber energi utama untuk aktivitas memasak sehari-hari.
8. Konsumsi daging merah, susu, atau ayam terbatas hanya sekali dalam seminggu atau kurang.
9. Anda sebaiknya hanya berbelanja satu pakaian baru setiap tahun.
10. Hanya bisa mengonsumsi makanan sekali atau dua kali per hari
11. Tidak mampu membiayai pengobatan di puskesmas atau poliklinik karena keterbatasan biaya
12. Pekerjaan sebagai kepala rumah tangga yang sesuai dengan kriteria mencakup petani yang memiliki lahan seluas 500 meter persegi, pekerja harian seperti buruh konstruksi, buruh pertanian, buruh perkebunan, nelayan, atau pekerjaan lain yang memiliki penghasilan bulanan kurang dari 600 ribu rupiah.

13. Tingkat pendidikan tertinggi kepala rumah tangga terbatas pada tidak pernah bersekolah, tidak menyelesaikan pendidikan dasar, atau hanya lulus sekolah dasar.
14. Dilarang menyimpan uang atau produk yang mudah dijual senilai minimal Rp 500.000, seperti sepeda motor (baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai), emas, ternak, perahu motor, atau aset modal lainnya.

Berdasarkan pemaparan Andriani & Sukmawati (2022), Dalam menghitung derajat kemiskinan, jumlah rupiah yang dibelanjakan keluarga juga ikut diperhitungkan. Jumlah tersebut sebanding dengan jumlah kilogram beras yang dikonsumsi setiap individu setiap tahunnya, baik di pedesaan maupun perkotaan.

Menurut Kumalasari dan Poerwono (2016), ada beberapa elemen yang berkontribusi pada kemiskinan, antara lain:

1. Pendapatan nasional suatu negara relatif rendah, dan pertumbuhan ekonominya minimal dibandingkan dengan negara lain.
2. Pendapatan rata-rata per orang rendah, dan tingkat kenaikannya sangat lambat atau tidak ada sama sekali.
3. Distribusi pendapatan tidak merata.
4. Sebagian besar penduduk hidup dalam kondisi yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan.
5. Kekurangan gizi, bersama dengan sarana dan layanan kesehatan yang kurang memadai (sangat terbatas).
6. Fasilitas pendidikan dan kurikulum belum memenuhi standar.

Todaro & Smith (2013) menekankan bahwasanya kemiskinan yang berlangsung di negara miskin diakibatkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Kemiskinan alami mengacu pada keadaan di mana kemiskinan muncul karena lingkungan alam di suatu daerah atau negara yang kurang subur dan memiliki sedikit sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Tipe kemiskinan ini dianggap sebagai konsekuensi langsung dari faktor geografis, meskipun pandangan tersebut sering mendapat kritik.

2. Kemiskinan disebabkan oleh penjajahan. Negara-negara yang menjadi sasaran kolonialisme pada jangka waktu yang lama pada akhirnya nantinya menjadi miskin akibat kemampuan penjajah dalam mengeksploitasinya. Di sisi lain, aspek ini juga mendapat kritik.
3. Kemiskinan akibat adat istiadat sosial budaya dll. Karena sulitnya mengubah perilaku seluruh masyarakat, maka kemiskinan ini diturunkan dari generasi sebelumnya. Sebagai contoh, suku-suku yang berada di pedalaman.
4. Kemiskinan karena lokasi yang dilindungi. Terisolasinya wilayah ini dari wilayah metropolitan dan sulitnya jalur transit merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan di wilayah tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah struktural. Ketidaksetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta persaingan yang tidak adil antara kawasan yang memiliki keunggulan dan yang tidak adalah penyebab utama kemiskinan.

Di samping faktor-faktor tersebut, kemiskinan pada suatu negara, juga diakibatkan oleh:

1. Pekerjaan utama masyarakat adalah bertani
2. Negara-negara yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan utama cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebagai akibatnya, hasil pertanian sering kali lebih rendah dibandingkan hasil dari sektor industri dan layanan. Selain itu, mengingat bahwa banyak praktik pertanian masih dilakukan dengan cara tradisional yang membutuhkan waktu lama, hal ini semakin memperburuk situasi. Selain itu, tingginya harga jual juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya pendapatan dari sektor pertanian.

3. Ekonomi dualitas.

Dua pihak berada di pusat perekonomian yang disebut ekonomi dualitas. Perekonomian pasar dan perekonomian pertanian lainnya merupakan wilayah konsentrasi utama bagi pihak pertama. Berbeda dengan perekonomian agraris yang sudah ketinggalan zaman, perekonomian pasar

bercirikan kekinian. Akibat skenario ini, terdapat disparitas pendapatan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan.

4. Sumber daya alam yang belum diolah  
Akibat pengolahan sumber daya alam yang tidak memadai, negara-negara tidak dapat mencapai kemajuan dalam pencarian sumber daya alam baru.
5. Tingkat pengangguran dan bayang-bayangnya  
Mereka tidak bisa menemukan pekerjaan yang berdasarkan tingkat pendidikan mereka, yang merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik.
6. Kurangnya inisiatif dan usaha di pihaknya  
Karena masyarakat tidak berinisiatif dan berupaya berinovasi dalam bekerja, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak mampu tumbuh dan meningkatkan pendapatannya.
7. Numerical Capital Negara-negara yang dianggap terbelakang mempunyai tingkat modal dan tabungan yang sangat rendah. Jika dibandingkan dengan sektor industri, yang menyumbang sekitar 15–20% pendapatan nasional bruto negara, investasi bruto sekedar memberikan kontribusi sekitar 5–6% dari total pendapatan nasional.
8. Keterbelakangan teknologi menyebabkan tingginya biaya produksi, rendahnya upah tenaga kerja, banyaknya pekerja yang tidak berpendidikan dan kurang pelatihan, serta tingginya biaya barang modal yang digunakan dalam pembuatan suatu produk..

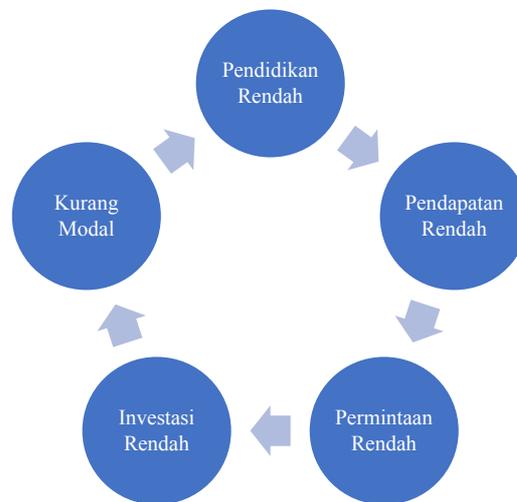
Bappenas (2011) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan dari 2 macam berikut ini :

1. Kurangnya sumber daya budaya.  
Ciri-ciri adat atau budaya suatu wilayah tertentu menjadi akar penyebab kemiskinan ini, yang mengikat seseorang atau sekelompok orang tertentu pada kemiskinan dan memastikan bahwa mereka terus menjadi bagian dari kemiskinan tersebut. Pemberantasan atau paling tidak mengurangi kemiskinan semacam ini dapat dilakukan dengan mengabaikan alasan-

alasan yang menghalanginya untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dapat membawa perbaikan taraf hidup.

## 2. Kemiskinan bersifat struktural

Atau dapat dikatakan, “seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin karena ia miskin”. Kemiskinan ini diakibatkan oleh tidak mempunya seseorang ataupun sekelompok masyarakat tertentu untuk mempertahankan diri pada sistem ataupun tatanan sosial yang tidak adil. Akibatnya, tidak mempunyai kesempatan untuk berkembang dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.



**Gambar 2.2. Lingkaran Kemiskinan**

Alasan Nurkse, seperti yang dikutip oleh Kuncoro (2012), berpendapat bahwa "Sebuah negara itu miskin karena itu adalah negara yang miskin." Negara miskin tetap miskin karena terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan, seperti yang dijelaskan oleh Nurkse. Ia berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya akibat kurangnya pertumbuhan masa lalu, namun juga hambatan pembangunan masa depan. Menurutnya, inti dari lingkaran ini yakni hambatan terhadap penciptaan modal yang tinggi, di mana rendahnya tabungan dan kurangnya insentif investasi saling memperkuat.

Nurkse mengidentifikasi dua lingkaran kemiskinan: terkait penawaran dan permintaan modal. Dalam hal penawaran, rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan, sehingga individu tidak mampu menabung. Akibatnya,

negara mengalami kelangkaan modal, yang membuat produktivitas tetap rendah dan mempertahankan kemiskinan.

Terkait dengan keinginan akan modal, pola lingkaran setan kemiskinan terwujud dalam berbagai cara di seluruh dunia. Ketika individu di negara-negara pengimpor mempunyai upah yang rendah, ukuran pasar untuk berbagai jenis komoditas menjadi terbatas, yang merupakan alasan rendahnya insentif untuk berinvestasi. Sebab, ukuran pasarnya terbatas. Sebaliknya, rendahnya pendapatan masyarakat merupakan akibat dari rendahnya produktivitas, yang merupakan tanda terbatasnya pengembangan modal di masa lalu dan akan terus terjadi di masa depan. Tidak adanya insentif untuk berinvestasi merupakan penyebab mendasar dari kurangnya penciptaan modal, yang berdampak pada terhambatnya pemberantasan kemiskinan pada sumbernya.

Untuk menentukan garis kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) kemudian dijumlahkan. Dikutip dari BPS (2019). Selanjutnya garis kemiskinan menurut World Bank (2005) adalah standar ukur yang ditetapkan untuk mengukur seseorang dalam kemiskinan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan pangan minimal yaitu sebesar 2100 kilokalori per penduduk per hari. Nilai ini dinyatakan dalam persentase. Terdapat 52 jenis komoditas yang termasuk dalam kelompok komoditas kebutuhan pokok pangan. Komoditas tersebut antara lain biji-bijian, Sayur-sayuran, ikan, susu, kacang-kacangan, umbi-umbian, daging, buah-buahan, minyak, telur, lemak, dan lain-lain. Dalam hal pendidikan, perumahan, sandang, dan kesehatan, GKNM merupakan kebutuhan minimal.

Di wilayah perkotaan, terdapat 51 jenis komoditas yang menyalurkan paket barang kebutuhan pokok non pangan, sedangkan di wilayah pedesaan terdapat 47 jenis komoditas yang menyalurkan paket tersebut. Terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal batas kemiskinan. Untuk tujuan menurunkan angka kemiskinan dengan memantau kemajuan yang telah dicapai dalam pengentasan kemiskinan selama ini, garis kemiskinan sengaja ditentukan pada tingkat yang tetap konstan secara riil setiap saat.

Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan yaitu (BPS, 2020):

1. Langkah pertama adalah mengidentifikasi populasi referensi, yang didefinisikan sebagai dua puluh persen dari total penduduk yang dianggap kaya di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Indeks Harga Umum (IHK) digunakan untuk menaikkan GKS periode berjalan yang merupakan GK periode sebelumnya. Setelah itu, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) dihitung berdasarkan acuan demografi tersebut.
2. GKM adalah jumlah nilai pengeluaran 52 jenis bahan pangan pokok yang benar-benar dimakan oleh penduduk acuan. Nilai ini setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Menghitung harga rata-rata kalori masing-masing 52 komoditas merupakan metode yang digunakan untuk menentukan nilai pengeluaran kebutuhan pokok pangan.
3. GKM kemudian diubah menjadi 2100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 dengan rata-rata harga implisit kalori menurut wilayah j dari populasi acuan. Konversi ini dilakukan untuk mendapatkan GKM.
4. GKNM adalah penjumlahan nilai kebutuhan minimum suatu pilihan barang bukan pangan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Rasio pengeluaran suatu komoditas atau subkelompok tertentu terhadap keseluruhan pengeluaran komoditas atau subkelompok tersebut yang dicatat dalam data konsumsi modul Susenas digunakan untuk menentukan nilai minimum yang diperlukan untuk setiap komoditas atau subkelompok non-makanan. saat menghitung nilai persyaratan minimum. Rasio ini berasal dari hasil Survei Paket Komoditas Kebutuhan Dasar (SPKKD 2004) yang dilakukan pada tahun 2004. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci tentang pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk komoditas non-makanan daripada data yang tersedia sebelumnya. dikumpulkan oleh modul konsumsi Sutena.
5. Jumlah GKM dan GKNM adalah nilai GK. Penduduk dianggap miskin bilamana rata-rata pengeluaran per kapita bulanannya lebih rendah dari

GK. Pada tahap berikutnya, jumlah penduduk yang tinggal di bawah GK ditentukan di tingkat kabupaten atau kota.

6. Mengevaluasi korelasi antara jumlah agregat individu miskin di suatu provinsi, yang berasal dari data Pushena, dan jumlah individu miskin di kabupaten atau kota, yang dipastikan dari data yang dikumpulkan pada fase sebelumnya.
7. Proporsi penduduk miskin dan garis kemiskinan (GK) setiap kabupaten dan kota ditentukan dengan menghitung jumlah penduduk miskin berdasarkan temuan prorata. Sebagai landasan dalam menentukan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks kesenjangan kemiskinan (P1), dilakukan perhitungan GK untuk masing-masing daerah dan kota.

Indikator kemiskinan yang digunakan Bappenas merupakan salah satu alat ukur yang mampu dipergunakan dalam mengetahui derajat kemiskinan yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang. Secara khusus, penanda kemiskinan yang sedang dipertimbangkan adalah :

1. Yang dimaksud dengan “pembatasan pangan” adalah suatu proses pengukuran yang mengkaji kuantitas dan kualitas pangan yang dimakan. Keterbatasan persediaan pangan, minimnya asupan kalori pada masyarakat miskin, dan rendahnya gizi pada bayi baru lahir, balita, dan ibu merupakan aspek-aspek yang menjadi indikator indikator ini.
2. Pembatasan Akses Kesehatan
3. Konsep pembatasan akses kesehatan mencakup evaluasi terhadap kendala yang dihadapi masyarakat, seperti rendahnya mutu layanan kesehatan dan keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Sumber pendapatan utama masyarakat adalah pertanian. Kendala ini mencakup terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dasar, kualitas layanan kesehatan primer yang kurang memadai, sedikitnya layanan reproduksi, jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, serta tingginya biaya perawatan dan pengobatan. Jika dibandingkan dengan rumah sakit, puskesmas sering kali menjadi pilihan

utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan layanan kesehatan.

4. Pembatasan Akses Pendidikan

Akses terhadap pendidikan sering kali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kualitas pendidikan yang tidak memadai, tingginya biaya pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta minimnya peluang untuk menempuh pendidikan. Keempat elemen ini menjadi indikator utama dalam mengukur keterbatasan akses pendidikan.

5. Akses terhadap pekerjaan dibatasi. Indikator ini dinilai dari terbatasnya lapangan kerja dan prospek usaha, belum memadainya perlindungan aset perusahaan, kesenjangan gaji, dan belum memadainya perlindungan kerja, khususnya bagi pekerja perempuan dan pekerja anak.
6. Kurangnya akses atas layanan perumahan dan sanitasi merupakan isu kelima. Indikasi yang digunakan antara lain sulitnya mendapatkan kawasan yang sehat dan layak huni, serta sulitnya mendapatkan suasana organisasi yang sehat dan bermartabat.
7. Kurangnya akses terhadap air sehat. Sulitnya memperoleh air bersih, terbatasnya pengendalian yang dapat dilakukan pada sumber air, dan buruknya kualitas sumber air menjadi tanda-tanda yang digunakan.
8. Keterbatasan dalam mendapatkan lahan. Kepemilikan serta kontrol atas tanah dan penguasaan lahan adalah tanda-tanda yang digunakan. Terdapat masalah yang mempengaruhi kehidupan keluarganya para petani, dan kekhawatiran ini berkaitan dengan akses lahan.
9. Akses terhadap kekayaan alam sangat terbatas. Keadaan lingkungan yang tidak baik dan kurangnya jumlah sumber daya alam menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam analisis ini. Pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, contohnya di kawasan pedesaan, area pesisir, dan daerah pertambangan, berhubungan langsung dengan indeks ini.
10. Indikasi ini berkaitan dengan belum adanya rasa aman dalam hidup baik secara sosial maupun ekonomi, dan menyatakan tidak adanya jaminan rasa aman. Partisipasi memerlukan akses terbatas. Rendahnya tingkat

partisipasi dalam perumusan kebijakan digunakan untuk menilai indikator ini.

11. Besarnya beban yang ditanggung penduduk; Indikator ini sehubungan dengan seberapa jauh tanggung jawab yang diemban keluarga dan tingkat tekanan yang dialami orang-orang dalam kehidupan mereka.

Menurut Todaro & Smith (2013) faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan nasional di suatu negara tergolong sedikit dan laju pertumbuhan ekonominya tidak signifikan jika dibandingkan dengan negara lain.
2. Pendapatan rata-rata per orang rendah, dan tingkat kenaikannya sangat lambat atau tidak ada sama sekali.
3. Distribusi pendapatan tidak merata.
4. Sebagian besar penduduk hidup dalam kondisi yang menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kemiskinan.
5. Kondisi gizi yang tidak baik, serta layanan dan sarana kesehatan yang kurang memadai (sangat terbatas).
6. Fasilitas pendidikan dan kurikulum belum memenuhi standar.

Yunanto (2015) mengidentifikasi penyebab kemiskinan adalah:

1. Kemiskinan, dalam skala makro, berasal dari kesenjangan dalam kepemilikan sumber daya, yang menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Akibatnya, orang miskin memiliki sumber daya yang sangat terbatas, menghasilkan kualitas di bawah standar.
2. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia menjadi akar permasalahan kemiskinan. Terdapat korelasi antara produktivitas yang buruk dengan rendahnya gaji yang diakibatkan oleh minimnya kualitas sumber daya manusia. Adapun sejumlah faktor yang berkontribusi pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, antara lain pendidikan yang tidak memadai, nasib yang kurang baik, prasangka buruk, dan peran sebagai orang tua.
3. Adanya kemiskinan mungkin disebabkan oleh kesenjangan akses terhadap keuangan. Menurut hipotesis lingkaran setan kemiskinan, tiga faktor yang

berkontribusi terhadap kemiskinan, yaitu keterbelakangan pembangunan, cacat pasar, dan kurangnya modal, merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan minimnya tingkat produktivitas. Karena produktivitas yang buruk, pendapatan diperoleh pada tingkat yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengakibatkan tingkat tabungan dan investasi yang lebih rendah. Ada pengaruh di latar belakang dan di luar investasi rendah.

(Kuncoro, 2012) menyebutkan fakta bahwa unsur-unsur berikut ini merupakan akar penyebab kemiskinan di negara-negara yang dianggap miskin antara lain:

1. Kemiskinan pada awalnya timbul dari kondisi alam suatu daerah atau masyarakat yang tandus dan tidak mampu menghasilkan sumber daya alam. Komponen ini juga telah menjadi sasaran kritik.
2. Kemiskinan disebabkan oleh penjajahan. Negara-negara yang telah lama menjadi sasaran kolonialisme pada akhirnya akan menjadi miskin akibat praktik eksploitatif para penjajah. Di sisi lain, aspek ini juga mendapat kritik.
3. Kemiskinan akibat adat istiadat sosial budaya dll. Karena sulitnya mengubah perilaku masyarakat, maka kemiskinan ini diturunkan dari nenek moyang. Sebagai contoh, suku-suku yang berada di pedalaman.
4. Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi geografis. Wilayah yang terpencil dari kota dan terbatasnya akses transportasi seringkali menjadi faktor penyebab kemiskinan di daerah tersebut.
5. Kemiskinan struktural. Selain ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan, kemiskinan ini juga dipicu oleh persaingan tidak sehat antara wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan yang tidak.

Di samping faktor tersebut, kemiskinan pada suatu negara, juga diakibatkan karena:

1. Pertanian ialah mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat. Negara-negara yang mata pencaharian utamanya adalah sektor pertanian akan menjadi negara-negara yang menghasilkan kemiskinan. Hal ini menyebabkan hasil pertanian lebih sedikit jika dibandingkan

dengan hasil sektor industri dan layanan. Terlebih lagi, mengingat cara bertani yang dilakukan oleh masyarakat masih tradisional dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, harga jual yang tidak mudah dijangkau membuat pendapatan dari sektor pertanian rendah.

2. Ekonomi dualitas.

Dua pihak berada di pusat perekonomian yang disebut ekonomi dualitas. Perekonomian pasar dan perekonomian pertanian lainnya merupakan wilayah konsentrasi utama bagi pihak pertama. Berbeda dengan perekonomian agraris yang sudah ketinggalan zaman, perekonomian pasar bercirikan kekinian. Akibat skenario ini, terdapat disparitas pendapatan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan.

3. Sumber daya alam yang belum terolah

Ketika sumber daya alam tidak diolah dengan maksimal, suatu negara tidak dapat menghasilkan sumber daya alam baru sehingga tidak dapat berkembang.

4. Tingkat pengangguran dan bayang-bayangnya

Mereka tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, yang merupakan penyebab utama terjadinya pengangguran terdidik.

5. Kurangnya inisiatif dan usaha di pihaknya

Karena masyarakat tidak berinisiatif dan berupaya berinovasi dalam bekerja, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut tidak mampu tumbuh dan menambah pendapatannya.

6. Modal dalam Bentuk Numerik

Negara-negara yang dianggap terbelakang mempunyai tabungan atau modal yang hampir sedikit. Sekitar lima hingga enam persen pendapatan nasional bruto negara terdiri dari investasi bruto, sementara sektor industri memberikan kontribusi sekitar lima belas hingga dua puluh persen..

Karena keterbelakangan teknologi, biaya produksi menjadi tinggi, gaji pekerja rendah, sejumlah besar pekerja buta huruf tidak diawasi, dan biaya barang modal yang digunakan untuk memproduksi suatu produk menjadi tinggi.

#### **2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi**

Peningkatan kemampuan jangka panjang sebuah negara guna memasok beragam produk ekonomi kepada masyarakatnya yakni apa yang kita maksud sewaktu kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Proses peningkatan kapasitas benar-benar ditentukan atau dimungkinkan oleh perkembangan atau modifikasi teknologi, institusi, dan ideologi yang dihasilkan sebagai respons terhadap beragam tuntutan situasi saat ini. Penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang masing-masing dari tiga komponen yang membentuk pertahanan mendasar ini. Pertumbuhan ekonomi tercermin dalam peningkatan output yang berkelanjutan, sementara kemampuan menyediakan berbagai barang menandakan kematangan ekonomi suatu negara. Selain itu, kemajuan teknologi adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat penting, namun tidak cukup hanya dengan teknologi; elemen lain seperti organisasi, sikap, dan ideologi juga diperlukan untuk mendukung kemajuan ini. (Astuti, 2015).

Berikut ini adalah daftar enam ciri atau proses pembangunan ekonomi yang secara luas terlihat di hampir semua negara yang saat ini dianggap maju, seperti yang diketahui melalui analisis ekstensif: Ada kecenderungan bagi negara-negara yang perekonomiannya baru saja mulai berkembang atau sudah sangat maju. Saya mencoba memasukkan komponen lain seperti area pemasaran dan pemasok sumber daya mentah. Ada kecenderungan negara-negara mencoba menambah bagian lain sebagai sumber bahan baku dan wilayah pemasaran.

1) Laju pertumbuhan produksi per kapita serta laju pertumbuhan penduduk. 2) Laju cepat dimana keseluruhan faktor produksi meningkat pesat Transformasi tingkat ketiga adalah tingkat dasar, yaitu tingkat ekonomi tinggi. Tingkat keempat adalah tingkat kuatnya reformasi sosial dan ideologi. 5) Ada pola negara-negara yang memasukkan bagian lain ke dalam lembaganya. baru, 6) Distribusi ekonomi terbatas yang hanya mencakup seluruh populasi dunia (Astuti, 2015).

Untuk mengukur perkembangan suatu perekonomian secara akurat, diperlukan alat ukur yang memadai. Di antara sekian banyak alat ukur ekonomi adalah sebagai berikut (Astuti, 2015).

1. Pendapatan domestik bruto (PDB) atau pendapatan regional bruto (GRDPRB) merupakan total semua barang dan layanan akhir yang dihasilkan oleh sebuah ekonomi dalam setahun, diukur berdasarkan nilai pasar. PDB terukur dan PDB keduanya adalah indikator global yang bersifat material dan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan nyata masyarakat setempat di kehidupan sehari-hari, yang seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh warga negara atau area tersebut. Ini bukanlah ilmu ekonomi yang sempurna.

Pendapatan domestik bruto per jiwa atau pendapatan regional bruto per jiwa (PDB) di tingkat daerah dapat digunakan sebagai indikator yang lebih tepat untuk menilai pertumbuhan ekonomi karena lebih cepat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara dibandingkan dengan PDB secara keseluruhan. Pendapatan domestik bruto per jiwa pada tingkat nasional atau PDB regional dihitung dengan membagi total PDB dengan jumlah penduduk di negara-negara yang ada di wilayah tersebut. Ini juga dikenal sebagai rata-rata PDB atau PDB per jiwa.

Teori pembangunan ekonomi ditulis oleh Schumpeter yang mengatakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi dengan teratur melainkan mengalami suatu skenario dimana suatu saat akan mengalami perkembangan dan pada saat yang lain mengalami penurunan. Buku Schumpeter berjudul *The Theory of Economic Development*. Aktivitas para wirausahawan (wirausahawan) yang melakukan inovasi seperti ini akan mengakibatkan terciptanya investasi, dan semakin banyak investasi maka akan menyebabkan peningkatan aktivitas perekonomian (Sukirno, 2013). Konjungtur ini dihasilkan oleh aktivitas pengusaha. Berikut ini ialah beberapa teori pertumbuhan yang telah dijabarkan oleh sejumlah pakar ekonomi yang berbeda:

1. Teori Pertumbuhan Klasik
2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar
3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik
4. Teori Pertumbuhan Baru

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini muncul sejak Revolusi Industri (akhir abad ke-18) hingga awal abad ke-19, ketika rezim liberal mendominasi perekonomian.

- a. Adam Smith

Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam langkah-langkah yang bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pasar yang lebih besar serta akumulasi modal, spesialisasi dalam pekerjaan akan muncul, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi para pekerja. Kenaikan efisiensi ini akhirnya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional, yang kemudian berdampak pada pertumbuhan populasi dan pengembangan pasar. Namun, kemajuan ini terhambat oleh keterbatasan sumber daya alam dan penerapan hukum hasil yang cenderung menurun seiring bertambahnya input.

Adam Smith menentang intervensi pemerintah dalam pengelolaan ekonomi (Mankiw, 2013). Pengaturan sistem ekonomi sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat (aktor ekonomi) yang beroperasi melalui mekanisme pasar, di mana masyarakat (baik konsumen maupun produsen) harus menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan yang ada.

- b. David Ricardo

Ricardo menjelaskan bahwa masyarakat ekonomi terbagi menjadi tiga kelompok: kelas pemilik modal, kelas buruh, dan kelas pemilik tanah. Dalam pembagian ini, pendapatan nasional terdiri dari tiga elemen: sewa tanah, upah pekerja, dan keuntungan.

- c. Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa peningkatan populasi akan menyebabkan kenaikan permintaan, dan hal ini merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum membuat keputusan. Selain itu, perlu adanya kemajuan dalam aspek-aspek pembangunan lainnya setelah

pembangunan tersebut selesai. Untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penting untuk meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk investasi, dan modal ini dapat diperoleh melalui tabungan. Namun demikian, investasi ini terhambat oleh penurunan permintaan efektif akibat peningkatan jumlah penduduk, yang menyebabkan kenaikan gaji dan memberikan tekanan pada perekonomian. Selain itu, pandangan dikumpulkan dan disimpan karena belum dimakan seluruhnya. Akibatnya, Malthus mempunyai pandangan negatif terhadap ekspansi perekonomian.

## 2. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Secara umum, untuk mencapai tujuan pencapaian lahan, diperlukan mobilisasi sumber daya baik dari dalam negeri ataupun internasional dengan tujuan melakukan investasi dalam jumlah yang cukup dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Harrod-Domar mengingatkan kita bahwasanya kapasitas barang modal pada perekonomian nantinya naik sebagai konsekuensi dari investasi yang dilakukan secara massal berikutnya (Sukirno, 2013).

Menurut Harrod-Domar, tujuan utama investasi adalah untuk menunjukkan keadaan yang diperlukan agar pertumbuhan yang stabil dapat terjadi. Pertumbuhan yang stabil, yang mampu digambarkan menjadi pertumbuhan yang nantinya selalu menghasilkan penggunaan penuh instrumen modal yang akan selalu diberlakukan pada perekonomian, merupakan tujuan dari investasi. Realisasi hubungan jangka panjang antara investasi yang lebih besar (penciptaan modal) dan pembangunan ekonomi akan menjadi kekuatan pendorong di balik ekspansi Harrod-Domar yang luar biasa.

Teori Harrod-Domar menggambarkan dua peran pembentukan modal dalam aktivitas ekonomi. Secara teori, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang mampu meningkatkan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang atau meningkatkan permintaan yang dapat diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Artinya, pembentukan modal dalam jumlah tertentu pada suatu periode akan meningkatkan kemampuan perekonomian dalam memproduksi barang pada periode berikutnya. Lebih lanjut, Harrod-Domar meyakini peningkatan kapasitas produksi tidak akan terjadi secara otomatis.

Sekalipun kapasitas produktif meningkat, output masyarakat meningkat dibandingkan periode sebelumnya sehingga berdampak pada peningkatan baru pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Secara teori, Harrod-Domar menggunakan contoh berikut:

- a. Ekonomi telah mencapai tingkat pekerjaan penuh, dan sumber daya modal yang ada di masyarakat dimanfaatkan secara optimal.
- b. Struktur ekonomi terdiri dari dua bagian, yaitu sektor domestik dan sektor bisnis, yang berarti pemerintah serta perdagangan internasional tidak termasuk dalam ekonomi.
- c. Karena jumlah tabungan masyarakat diukur sebagai bagian dari pendapatan nasional, maka analisis tabungan dimulai dari titik nol. Sebagaimana keinginan untuk menabung mempunyai batas, demikian pula rasio modal terhadap jumlah output, yang sering disebut dengan Capital Output Ratio. Selain itu, terdapat batasan rasio yang telah ditentukan yang sering disebut dengan Inkremental Capital Out Ratio, yaitu rasio yang dihitung antara jumlah modal baru dengan jumlah peningkatan output.

Penjelasan inti dari konsep ini adalah bahwa investasi yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu tertentu bertujuan ganda. Pertama, untuk menggantikan barang modal yang sudah tidak dapat dipakai. Kedua, untuk meningkatkan jumlah alat modal yang ada.

### 3. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut pandangan ini, kemajuan teknologi berperan penting dalam kemajuan ekonomi dan mempengaruhi laju pembangunan ekonomi suatu negara. Penganut aliran neoklasik percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan peningkatan faktor produksi. Aliran klasik, yang menganggap bahwa perekonomian akan mencapai lapangan pekerjaan penuh dan kapasitas modal akan dimanfaatkan sepenuhnya, menjadi dasar pandangan ini. Dalam teori ini, teknologi dipandang sebagai komponen eksternal yang dapat diperdagangkan antarnegara, sehingga dalam ekonomi terbuka, semua elemen produksi dapat berpindah bebas, dan proses konvergensi akan menyebabkan

perkembangan ekonomi negara-negara dunia menjadi lebih merata. (Kartasasmita, 1996).

#### 4. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*)

Teori ini memberikan fondasi untuk studi pertumbuhan endogen. Teori ini berpendapat bahwa sistem ekonomi itu sendiri bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi, lebih daripada faktor dari luar. Dalam hal inovasi teknologi, keputusan aktor ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan menyebabkan pertumbuhan. Ketika modal yang ada mencakup modal fisik dan manusia, peran modal menjadi lebih dari sekadar sumber pendapatan (Mankiw, 2013).

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal. Konsep modal harus diperluas untuk mencakup sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan. Melainkan merupakan bagian integral dari proses pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi tidak berasal dari luar sistem atau eksogen. Dalam teori pertumbuhan endogen, investasi dalam modal fisik dan modal manusia sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Investasi dan tabungan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil (Mankiw, 2013).

### **2.2 Penelitian Sebelumnya**

Niyimbanira (2017) Artikel tersebut dimuat di majalah internasionalnya dan diberi judul "Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Afrika Selatan: Kasus Provinsi Mpumalanga". Dengan menggunakan statistik dari provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan, artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ekspansi ekonomi berdampak pada disparitas pendapatan dan prevalensi kemiskinan. Untuk melakukan analisis, model regresi fixed effect dan pool digunakan, dan data sekunder dikumpulkan dari 18 kota di provinsi Mpumalanga. Berdasarkan temuan tersebut, ekspansi ekonomi efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun tidak berdampak pada pengurangan disparitas pendapatan. Penting bagi para pembuat kebijakan di Afrika Selatan untuk mempertimbangkan hasil studi ini ketika mengembangkan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di negara tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian, diberikan rekomendasi mengenai strategi

sosial ekonomi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan menambah pembangunan manusia pada perekonomian berbasis pengetahuan.

Sayed & Peng (2020) dalam jurnal internasionalnya yang berjudul *Pandemics and income inequality: a historical review*. Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak pandemi terhadap ketimpangan pendapatan pandemi yang merenggut lebih dari 100.000 nyawa. Mengingat pandemi memang demikian peristiwa yang jarang terjadi, kami telah menggunakan data selama 100 tahun terakhir (1915–2017) dan berkaitan dengan empat pandemi. Studi ini mencakup empat negara yang pernah mengalami hal ini data ketimpangan pendapatan yang mencakup periode tersebut. Menggunakan metode data panel-fixed dan estimator kelompok rata-rata yang ditambah kami menemukan pengaruh yang signifikan pandemi ini terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Studi tersebut berpendapat bahwa berdasarkan karakteristik pandemi COVID-19, yaitu kematian sangat terkonsentrasi pada kelompok usia yang lebih tua, kita tidak dapat mengharapkan adanya kelangkaan tenaga kerja atau penurunan tajam dalam produktivitas; namun, kita dapat memperkirakan adanya penurunan konsumsi, kemungkinan adanya tabungan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan rasio utang pemerintah yang tinggi. Yang terakhir Sejauh ini dampak COVID-19 terhadap ketimpangan masih belum jelas, begitu pula beberapa hal yang melekat di dalamnya karakteristik mendorong peningkatan ketimpangan. Sebaliknya, kelompok lain mendorong ke arah mempersempit kesenjangan pendapatan.

Setiani (2015) melakukan studi mengenai “Penerapan Regresi Spasial untuk Memodelkan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan komponen yang memengaruhi ketimpangan dengan menggunakan model regresi spasial. Jumlah populasi yang tidak mampu adalah variabel yang diukur (Y) dalam penelitian ini. Indeks pembangunan manusia, jumlah pekerja di sektor pertanian, dan tingkat pengangguran adalah variabel yang memengaruhi. Penelitian ini menganalisis model autoregresif spasial (SAR). Hasilnya menunjukkan bahwa SAR adalah model yang paling efektif. Variabel yang menyebabkan ketidaksetaraan termasuk

indeks pembangunan manusia, jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian, dan tingkat pengangguran.

Fatkul (2014) menulis esai berjudul "Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin: Studi Kasus 33 Provinsi di Indonesia." Penelitian ini memanfaatkan indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan tingkat pengangguran sebagai variabel independen. Jumlah individu yang tinggal dalam kemiskinan adalah variabel dependen yang diperiksa. Pendekatan Kuadrat Terkecil Biasa (OLS) digunakan untuk menentukan dampak variabel independen pada variabel dependen. Temuan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memberikan pengaruh kolektif, dibuktikan dengan koefisien penentuan 0,743 (R-Square). Meskipun demikian, dalam penilaian individu, produk domestik regional bruto tidak mempengaruhi angka kemiskinan secara signifikan. Indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Adit (2010) melakukan penelitian berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan: Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga 2007. Penelitian ini menggunakan model efek tetap untuk memeriksa data panel. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan boneka daerah untuk memeriksa kesenjangan tingkat kemiskinan di antara 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Nilai  $R^2$  yang dikoreksi diperoleh adalah 0,982677. Studi ini menunjukkan bahwa upah minimum, pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi ketimpangan.

Desi (2015) melakukan penelitian berjudul "Penerapan Regresi Spasial untuk Pemodelan Ketimpangan di Indonesia Tahun 2013." Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan menggunakan model regresi spasial. Temuan menunjukkan bahwa SAR adalah model yang paling berkhasiat. Indeks pembangunan manusia, lapangan kerja di sektor pertanian, dan tingkat pengangguran adalah faktor yang mempengaruhi ketimpangan.

Suliswanto (2010) melakukan penelitian berjudul *The Impact of Gross Domestic Product (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketidakmerataan Pendapatan di Indonesia*. Studi ini meneliti dampak PDB dan IPM terhadap tingkat ketimpangan di dalam negara. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil studi menunjukkan bahwa PDB tidak cukup berdampak pada pengurangan ketimpangan lintas wilayah. Sebaliknya, variabel HDI memberikan dampak yang lebih signifikan pada pengurangan.

Rivai (2014) melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Tingkat Pengangguran Provinsi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai korelasi antara tingkat pengangguran, upah minimum provinsi, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Kesimpulan penelitian, yang berasal dari pendekatan regresi linier berganda, menunjukkan bahwa upah minimum provinsi secara signifikan berdampak negatif pada tingkat kemiskinan.

Hapsoro (2013) menyelidiki dampak variabel makroekonomi regional terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia dari tahun 2007 hingga 2010. Studi ini berupaya memastikan pengaruh variabel ekonomi, termasuk PDB, tingkat pengangguran, dan inflasi, terhadap ketimpangan di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik Fixed Effect Model (FEM) yang memanfaatkan data panel. Temuan menunjukkan bahwa PDB memberikan dampak negatif yang cukup besar, sedangkan tingkat pengangguran dan inflasi menunjukkan efek yang menguntungkan.

Rusdarti (2015) meneliti faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Studi ini berupaya untuk menjelaskan kesenjangan di Provinsi Jawa Tengah dan meneliti dampak PDB, tingkat pengangguran, dan pengeluaran publik terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Metode Ordinary Least Squares (OLS) digunakan untuk memeriksa data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap ketidaksetaraan. Prevalensi kemiskinan secara signifikan lebih besar di daerah pedesaan dibandingkan dengan pusat kota. Meskipun

pengangguran memberikan pengaruh minimal pada ketidaksetaraan, PDB dan faktor-faktor lainnya, termasuk pengeluaran pemerintah, menunjukkan dampak statistik yang substansial.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Ketimpangan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor seperti perbedaan sumber daya alam, infrastruktur, sektor ekonomi dominan, dan kebijakan pemerintah. Provinsi Jambi sendiri memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah barat dan timur, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun pembangunan.

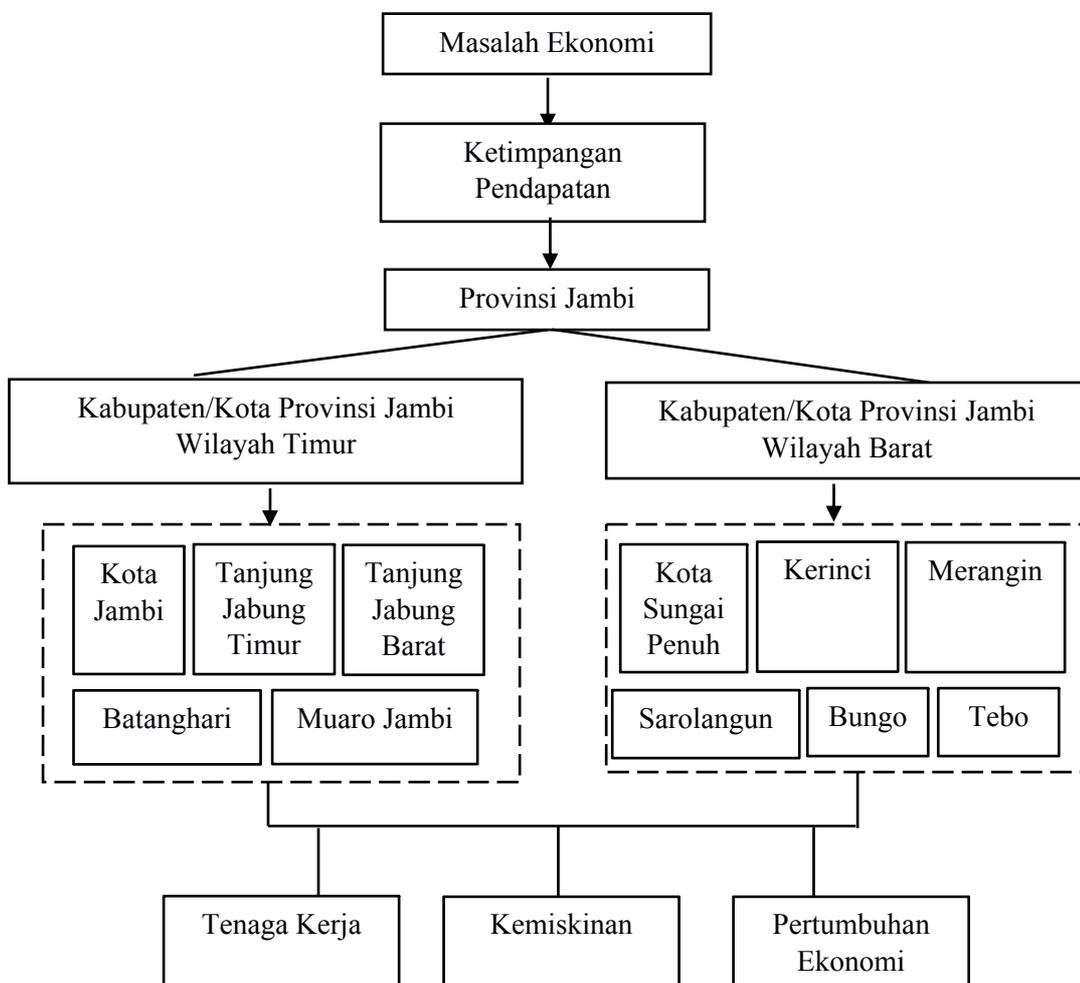
Wilayah Barat Jambi terdiri dari daerah yang lebih didominasi oleh sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Daerah ini memiliki topografi yang lebih berbukit dan akses infrastruktur yang masih terbatas. Sektor ekonomi yang berkembang di wilayah ini cenderung bergantung pada hasil pertanian seperti karet dan kelapa sawit. Wilayah Timur Jambi memiliki karakteristik ekonomi yang lebih beragam. Daerah ini lebih berkembang dalam sektor industri, perdagangan, dan jasa karena letaknya yang lebih dekat dengan pusat kota serta memiliki akses transportasi yang lebih baik. Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi juga berada di wilayah timur, yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.

Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi masalah ketimpangan masih belum stabil, masalah mengenai ketimpangan yang tinggi dan cenderung belum stabil begitu penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya terhadap perekonomian yang bisa menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan yang nantinya muncul masalah baru yaitu tingkat pengangguran yang selalu meningkat. Oleh karena itu pentingnya pengendalian terhadap ketimpangan serta melihat faktor-faktor apa saja yang dapat diambil dalam membawa dampak pada ketimpangan agar dapat stabil.

Tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi adalah beberapa penyebab ketidaksetaraan. Salah satu indikator yang memengaruhi ketidakadilan

dalam distribusi pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diharapkan pendapatan nasional akan didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat, dengan penekanan khusus pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Ini diharapkan akan mengurangi ketimpangan.

Melalui pemaparan yang telah dijabarkan diatas dan dalam kajian pustaka, alhasil variabel terkait pada penelitian ini mampu dilakukan perumusan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Menurut teori dan penelitian terdahulu, alhasil mampu dirumuskan hipotesis seperti berikut:

1. Diperkirakan bahwa peningkatan ekonomi, kemiskinan, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota di wilayah Barat Provinsi Jambi.
2. Diperkirakan bahwa ketidaksetaraan pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bagian Timur dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tenaga kerja.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### **4.2. Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1. Jenis Data**

Data yang berasal dari sumber sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari laporan dan jurnal yang telah diterbitkan sebelumnya dan disajikan dalam format data yang diorganisir berdasarkan urutan waktu. (Sanusi, 2018) selama tahun 2017-2023 dan cross section Kabupaten Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat dan Jambi Wilayah Timur periode 2017-2023. Jenis data yang dipilih pada penelitian ini yakni :

- a. Realisasi Tenaga kerja Kota dan Kabupaten Provinsi Jambi periode 2017-2023.
- b. Kemiskinan Kota dan Kabupaten Provinsi Jambi periode 2017-2023.
- c. Pertumbuhan ekonomi Kota dan Kabupaten Provinsi Jambi periode 2017-202.
- d. Ketimpangan pendapatan Kota dan Kabupaten Provinsi Jambi periode 2017-2023,

### **3.1.2. Sumber Data**

Data yang diimplementasikan pada penelitian ini dikumpulkan dari data dan informasi yang tersedia sebelumnya, selain laporan yang dikumpulkan oleh dinas dan lembaga yang terkait dengan topik tersebut. Tinjauan pustaka dilakukan dalam bentuk karya sastra guna memperoleh landasan teori, penelitian masa lalu, dan kerangka konseptual berpikir. Temuan ini berasal dari BPS Provinsi Jambi yang menjadi sumber datanya.

### **4.3. Metode Analisis**

Alat statistik yang diterapkan selama penelitian ini meliputi analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dipergunakan guna mengkarakterisasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tantangan yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Sementara itu analisis kuantitatif diterapkan dalam tujuan mengidentifikasi informasi kuantitatif, yakni data yang mampu diukur, dianalisis, dan dipahami melalui penggunaan persamaan, tabel, dan bentuk lain yang analog.

### **3.3. Alat Analisis Data**

Analisis deskriptif dijalankan untuk mengetahui perkembangan terbesar dan terendah, serta rata-rata setiap variabel penelitian, guna mengetahui dan

menganalisis perkembangan tenaga kerja, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan ketidakmerataan pendapatan di wilayah Kabupaten/Kota Jambi. Provinsi, Wilayah Barat dan Timur. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tersebut.

Teknik analisis yang digunakan, data regresi panel, digunakan untuk memahami sejauh mana variabel seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tenaga kerja memengaruhi ketimpangan pendapatan di kabupaten dan kota di Provinsi Jambi Wilayah Barat dan Timur. Model regresi berikut digunakan (Gujarati, 2012):

$$Y_{it} = \alpha + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + \alpha_4 X_{4it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

Selanjutnya, akan diubah menjadi persamaan ini:

Provinsi Jambi wilayah Timur :

$$KP_{it} = \alpha + \alpha_1 TK_{it} + \alpha_2 KM_{it} + \alpha_3 PE_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Provinsi Jambi wilayah Barat:

$$KP_{it} = \alpha + \alpha_1 TK_{it} + \alpha_2 KM_{it} + \alpha_3 PE_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

Dimana:

- $KP_{it}$  = Ketimpangan Pendapatan
- $TK_{it}$  = Tenaga Kerja
- $KM_{it}$  = Kemiskinan
- $PE_{it}$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  = Koefisien masing-masing variabel
- $\alpha_0$  = Konstanta
- $e$  = Kesalahan pengganggu (stokastik)

Untuk memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang kedua, pendekatan yang dipergunakan yakni analisis regresi data panel, dan alat analisis yang digunakan adalah Eviews 9. Paa penelitian ini nantinya digunakan beberapa persamaan regresi linier, dan data panel akan digunakan. Menurut (Nachrowi & Usman, 2012) Data panel yakni gabungan antara data individual (*cross section*) dan data periodik (*time series*), seperti yang telah disampaikan pada kalimat sebelumnya. Data yang diperoleh seseorang selama periode waktu tertentu

disebut sebagai data deret waktu. Data yang diperoleh pada satu titik waktu tertentu disebut sebagai data *cross section*.

Keunggulan regresi data panel berdasarkan Wibisono (2012) diantaranya :Pertama. Selain itu, data panel mampu memberikan penjelasan eksplisit atas variabilitas individu karena memungkinkan untuk memasukkan faktor-faktor spesifik per orang. Sebagai hasil dari kemampuan memperhitungkan heterogenitas, data panel berpotensi dipilih dalam pengujian dan konstruksi model perilaku yang lebih rumit. Terakhir, karena pendekatan data panel didasarkan pada pengamatan lintas bagian yang berulang (deret waktu), maka pendekatan ini sesuai untuk diterapkan dalam konteks penelitian penyesuaian dinamis; Keempat, Banyaknya observasi memiliki dampak pada data, menjadikannya lebih bermanfaat dan variatif. Selain itu, kolinearitas (multikolinieritas) antara data semakin rendah, dan derajat kebebasan (df) meningkat, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk menganalisis model perilaku yang kompleks. Keenam, data panel dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemungkinan bias yang mungkin muncul akibat pengumpulan data individu.

#### 1. Metode Data Panel

Adapun tiga metode pengolahan berbeda yang dapat dipergunakan pada proses pemodelan melalui teknik regresi data panel. Metode-metode tersebut antara lain metode *Common Effect (pooled less square)*, metode *Fixed Effect (FE)*, dan *metode Random Effect (RE)*.

Metode Common Effect adalah pendekatan yang mengolah data dengan cara menggabungkannya tanpa mempertimbangkan variasi waktu maupun perbedaan antar individu. Metode ini berasumsi bahwasanya pola perilaku data di setiap wilayah tetap seragam sepanjang berbagai periode waktu. (Winarno, 2011). Persamaan regresi Metode *Common Effect* dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\dots\dots\dots(3.3)$$

Metode Fixed Effect yakni teknik estimasi data panel yang memanfaatkan variabel *dummy* dalam mengidentifikasi perbedaan dalam intersep antar unit. Pendekatan ini menganggap bahwa kemiringan regresi (*slope*) konsisten baik

antara individu maupun waktu (Winarno, 2011). Meskipun demikian, interseptnya bervariasi antar wilayah meski tetap sama sepanjang waktu (*time invariant*). Meskipun demikian, metode ini memiliki kelemahan, yakni mengurangi derajat kebebasan (*degree of freedom*), yang pada gilirannya dapat menurunkan efisiensi dalam estimasi parameter..

Persamaan regresi Metode *Fixed Effect* dapat dituliskan seperti berikut:

$$\dots\dots\dots(3.4)$$

Metode *Random Effect* yakni pendekatan untuk memperkirakan data panel yang menganggap bahwasanya variabel gangguan dapat saling terkait baik antar waktu maupun antar individu (Widarjono, 2017). Teknik yang diterapkan pada metode ini yakni melalui variabel gangguan (*error terms*) yang berpotensi mempengaruhi hubungan antara periode waktu dan antar kabupaten/kota.

Persamaan regresi Metode *Random Effect* dapat dituliskan seper berikut:

$$\dots\dots\dots(3.5)$$

#### 1. Uji Pemilihan Metode Data Panel

Serangkaian uji, termasuk uji Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier*, digunakan untuk mengevaluasi model regresi data panel. Tujuan dari uji ini adalah untuk menentukan metode regresi yang paling cocok, apakah menggunakan efek umum, efek tetap, atau efek acak, berdasarkan data panel yang diuji (Widarjono, 2017).

Berdasarkan pemaparan Widarjono (2017), uji Chow ialah pengujian yang membandingkan model dengan efek tetap dengan model dengan efek umum. Pada pemeriksaan ini dilakukan uji Chow dengan menggunakan aplikasi Eviews. Uji Chow atau Uji Rasio Kemungkinan digunakan dalam proses pengujian, dengan asumsi yang dilakukan sebagai berikut:

H<sub>0</sub>: model mengikuti *Pool*

H<sub>1</sub>: model mengikuti *Fixed*.

H<sub>0</sub> ditolak bilamana *P-value* di bawah nilai  $\alpha$ . Sebaliknya, H<sub>0</sub> diterima bilamana *P-value* melebihi nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang dipergunakan sebanyak 5%.

Menurut Gujarati (2012), uji Hausman merupakan pengujian yang menganalisis perbedaan antara *model fixed effect* dan *model random effect* untuk

menetapkan model mana yang paling cocok dipergunakan menjadi model regresi data panel. Secara khusus, uji Hausman menggunakan perangkat lunak yang sebanding dengan uji Chow. program *Eviews*. Pengujian yang dijalankan melalui *Hausman test* melalui asumsi, yakni:

H<sub>0</sub>: model mengikuti *Random Effect*

H<sub>1</sub>: model mengikuti *Fixed Effect*.

H<sub>0</sub> ditolak bilamana *P-value* di bawah nilai  $\alpha$ . Sebaliknya, H<sub>0</sub> diterima bilamana *P-value* melebihi nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang dipergunakan sebanyak 5%.

Untuk melakukan pengujian tersebut digunakan Uji *Lagrange Multiplier*. Asumsi yang dibuat adalah jika nilai estimasi LM melebihi nilai krusial Chi-Squares, alhasil menunjukkan bahwasanya model *Random Effect* ialah model yang paling cocok untuk regresi data panel. Berikut hipotesis yang dikembangkan dengan uji LM:

H<sub>0</sub> : *Common Effect Model*

H<sub>1</sub> : *Random Effect Model*

H<sub>0</sub> ditolak bilamana *P-value* di bawah nilai  $\alpha$ . Sebaliknya, H<sub>0</sub> diterima bilamana *P-value* melebihi nilai  $\alpha$ . Nilai  $\alpha$  yang dipergunakan sebanyak 5%.

### **3.3.1. Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi sejauh mana pengaruh yang dimunculkan oleh variabel independen pada variabel dependen yang sedang dianalisis. Nilai R<sup>2</sup> yang lebih tinggi memperlihatkan bahwasanya variabel independen membawa dampak yang lebih besar pada variabel dependen.

### **3.3.2. Uji Statistik *t* (Uji Parsial)**

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen masing-masing. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel independen dapat secara akurat menunjukkan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menilai pengaruh faktor-faktor independen secara terpisah pada variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap tidak berubah. Ini adalah persyaratan yang diperlukan untuk pengujian tersebut.

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak  $pvalue > 0,1$  atau bilamana nilai signifikansi melebihi nilai  $alpha$  0,1 yang menandakan variabel independen secara individual tidak membawa dampak pada variabel dependen.
- 2)  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima  $pvalue < 0,1$  atau bilamana nilai signifikansi di bawah  $alpha$  0,1 menandakan variabel independen secara individual membawa dampak pada variabel dependen.

### 3.3.3. Uji Statistik F

Tujuan dari pengujian ini adalah guna mengidentifikasi besar atau tidaknya dampak variabel independen pada variabel yang dievaluasi. Dengan syarat nilai signifikan F kurang dari 10% alhasil berkesimpulan bahwasanya variabel-variabel independen secara bersama-sama memawa dampak pada variabel yang diteliti. Sebaliknya bilamana nilai signifikan F melebihi 10% berarti faktor independen tidak mempunyai pengaruh pada variabel yang diteliti (variabel dependen). Dalam hal ini, tingkat kepentingan yang dipergunakan yakni 10%.

### 3.3.4. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan data panel dalam penelitian mendatangkan sejumlah manfaat, antara lain data yang digunakan lebih informatif, memiliki derajat variabilitas yang lebih tinggi, memiliki derajat kolinearitas antar variabel yang lebih rendah, mempunyai derajat kebebasan yang lebih besar, dan menggunakan lebih banyak sumber daya. Dengan menggunakan data panel, kita dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak secara lebih akurat, hal yang tidak mungkin dijalankan melalui pendekatan pengukuran cross-sectional atau time-series.

Data panel memungkinkan dalam mempelajari hal-hal yang lebih rumit tentang perilaku model, yang berarti bahwa menilai data panel tidak memerlukan pelaksanaan uji asumsi tradisional (Gujarati, 2012). Secara umum diterima bahwa tidak perlu memverifikasi asumsi klasik yang disertakan pada model data panel karena manfaat yang ditawarkan oleh regresi data panel.

## 3.4 Operasional Variabel

Adapun variabel yang dipergunakan pada penelitian ini yakni :

1. Ketimpangan pendapatan ialah jumlah persentase ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi wilayah Barat dan wilayah Timur periode satu tahun dalam satuan persen (pendekatan gini rasio) periode tahun 2017-2023.
2. Tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi wilayah Barat dan wilayah Timur, dinyatakan dalam orang selama periode tahun 2017-2023.
3. Tingkat kemiskinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah persentase kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi pada daerah Barat dan Timur pada tahun 2017-2023.
4. Perkembangan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi bagian Barat dan bagian Timur, dari tahun 2017 hingga 2023, diungkapkan dalam persentase (%).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1 Letak Geografis**

Provinsi Jambi terletak antara 0°45' LU dan 2°45' LS dan 101°10' BT. Terletak di utara oleh Provinsi Riau, di selatan oleh Sumatera Selatan, di barat oleh Sumatera Barat, dan di timur oleh Selat Berhala. Lokasi strategisnya mendukung perdagangan antarpulau dan termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan yang berdampak positif pada perekonomian daerah.

Melalui UU No. 54 Tahun 1999, wilayah administratif Provinsi Jambi diperluas dengan pembentukan Kabupaten Muaro Jambi, Sarolangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Timur. Setelah pemekaran Kabupaten Bungo Tebo, terbentuk dua kabupaten baru: Tebo (ibu kota di Muara Tebo) dan Bungo (ibu kota di Muaro Bungo). Dengan UU No. 25 Tahun 2008, Kota Sungai Penuh juga diresmikan sebagai bagian dari Provinsi Jambi, yang pada tahun 2010 terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Sejak 2008, Kabupaten Kerinci mengalami pemekaran menjadi Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

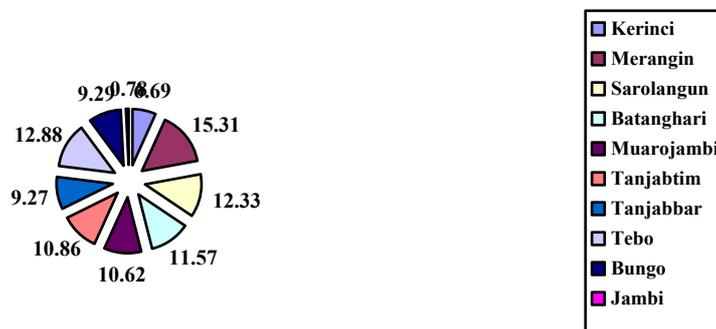
Wilayah Provinsi Jambi terdiri dari 11 kabupaten/kota dan berdasarkan posisi kewilayahan yang telah dijelaskan dari website [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id) (Pemerintah Provinsi Jambi, 2023) yang terdiri dari 5 kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi jambi bagian timur yakni : 1.Kota Jambi 2.Kabupaten Tanjung jabung timur 3.Kabupaten Tanjung jabung barat 4. Kabupaten Batnghari 5. Kabupaten muaro jambi dan 6 kabupaten/kota yang berada di provinsi jambi wilayah barat,yakni :1.Kota sungai penuh 2.Kabupaten kerinci 3. Kabupaten merangin 4.Kabupaten sarolangun 5.Kabupaten bungo dan 6.Kabupaten tebo. Adapun gambaran kondisi geografis Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1. Luas, Ibukota dan Persentase wilayah Kabupaten/Kota di Provins Jambi Tahun 2023**

Wilayah Bagian	Kabupaten / Kota	Ibukota	Luas Wilayah	Persentase
			(Km <sup>2</sup> )	(%)
Jambi	Batanghari	Muara Bulian	5.804	11,57

Wilayah Timur	Muaro Jambi	Sengeti	5.326	10,62
	Tanjung Jabung Timur	Muara Sabak	5.445	10,86
	Tanjung Jabung Barat	Kuala Tungkal	4.649,85	9,27
	Kota Jambi	Jambi	205,43	0,41
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	Kerinci	3.355,27	6,69
	Merangin	Bangko	7.679	15,31
	Sarolangun	Sarolangun	6.184	12,33
	Tebo	Muaro Tebo	6.461	12,88
	Bungo	Muaro Bungo	4.659	9,29
	Sungai Penuh	Sungai Penuh	391,5	0,78
	Provinsi Jambi	Kota Jambi	50.160,05	100

Sumber: Jambi dalam Angka 2021. BPS (Badan Pusat Statistik).



**Gambar 4.1 : Persentase Luas Daerah Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2023**

Jika dilihat dari data yang diperlihatkan pada tabel 4.1, nampak bahwasana wilayah Kabupaten Merangin mempunyai persentase tertinggi dari total luas wilayah Provinsi Jambi. Disusul Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, dan Kota Sungai Banyak. Kota Jambi memiliki bagian terkecil dari keseluruhan area. Terjadi peningkatan jumlah lapangan kerja di Provinsi Jambi sebagai dampak dari pembangunan kabupaten. Perkembangan tersebut turut didorong oleh penerapan sistem pemerintahan baru yang menyesuaikan program kerja dengan karakteristik unik daerah yang mengalami pemekaran. Pendekatan ini dilakukan melalui program Bottom Up, yang menitikberatkan pada kemandirian masyarakat lokal serta kemampuan mereka untuk menciptakan peluang kerja di sektor publik.

Dari segi topografi, Provinsi Jambi memiliki tiga kategori ketinggian yang beragam. :

- 1) Wilayah dataran rendah mulai dari 0-100 m (69,1%) terletak di sekitar wilayah timur hingga tengah. Selain itu, ada dataran dengan ketinggian sedang antara 100-500 m (16,4%), yang terletak di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan beberapa kabupaten Batanghari, Bungo, Tebo, Sarolangun, dan Merangin.
- 2) Di bagian tengah terdapat area dataran dengan ketinggian menengah 100-500 m (16,4 %). Area ini mencakup Tebo, Sarolangun, Bungo, dan Merangin, serta sebagian Batanghari; dan
- 3) 14,5% dari total Dataran tinggi berada di wilayah barat yang tingginya lebih dari 500 meter. Beberapa daerah antara lain Kota Sungai Banyak, Kabupaten Kerinci, dan sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin merupakan rumah bagi kawasan perbukitan ini.

Berbagai karakteristik lahan di Provinsi Jambi dapat diidentifikasi berdasarkan kondisi topografi, kemiringan lereng, dan kondisi hidrologi, seperti berikut:

- a) Lahan basah (LB): Luasnya 684.060 hektar, atau 13,41% dari total wilayah Jambi, dengan ketinggian antara 0 dan 10 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 0 dan 3%. Terletak di bagian timur laut garis pantai dan sebagian di wilayah tengah, termasuk wilayah sungai Batanghari dan subwilayahnya.
- b) Lahan kering rendah-menengah (LKDR): Wilayah ini mencakup 2.747.105 hektar, atau 53,87% dari total, dan tersebar di bagian selatan-timur (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah, dan bagian barat (Sarolangun, Merangin selatan, dan Kerinci tengah). Mereka memiliki kemiringan antara 3 dan 12%.
- c) Lahan kering dataran tinggi (LKDT): LKDT mencakup area seluas 903.180 hektar, atau 17,71% dari total, dengan ketinggian antara 100 dan 500 meter di atas permukaan laut dan kemiringan antara 12 dan 40%. Bagian barat dari wilayah ini termasuk Kerinci, Sarolangun-Merangin, Bungo, dan Tebo, dan

15,02% dari total adalah dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 meter, yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan di barat Provinsi Jambi.

#### 4.2 Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk berperan sebagai subjek sekaligus objek. Karena pembangunan dilakukan oleh rakyat dan diarahkan untuk mensejahterakan rakyat, maka hal ini diklaim. Dalam perjalanan waktu, pertumbuhan penduduk yang pesat diakibatkan oleh penurunan angka kematian, yang tidak diikuti dengan peningkatan angka kelahiran. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi sehingga langsung menimbulkan permasalahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jambi, silakan lihat tabel di bawah ini

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Jambi dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2022**

Wilayah Bagian	Kabupaten/ Kota	Luas Daerah	Jumlah Penduduk (orang)	Kepadatan penduduk (orang/km <sup>2</sup> )
		(km <sup>2</sup> )		
Jambi Wilayah Timur	Batanghari	5804	313.245	54
	Muaro Jambi	5326	412.524	77
	Tanjab Timur	5445	234.243	43
	Tanjab Barat	4649,85	324.595	70
	Kota Jambi	205,43	619.668	3016
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	3355,27	253.924	76
	Merangin	7679	357.683	47
	Sarolangun	6184	298.196	48
	Tebo	6461	344.827	53
	Bungo	4659	373.311	80
	Sungai Penuh	391,5	99.299	254
<b>Jumlah</b>		50160	3.631.515	347

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021, BPS Provinsi Jambi

Menurut data pada tabel tersebut, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebanyak 3.631.515 jiwa, dan luas wilayah provinsi 50.160 kilometer persegi. Kepadatan penduduknya 347 jiwa per kilometer persegi.

### 4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB yakni singkatan dari "Produk Domestik Regional Bruto", yang mana ialah nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi pada suatu wilayah atau daerah pada suatu periode waktu tertentu. Ini mencakup semua kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk produksi barang, jasa, pertanian, industri, perdagangan, dan sektor lainnya. PDRB digunakan untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu daerah dan untuk membandingkan kinerja ekonomi antara daerah yang berbeda. Untuk mengetahui PDRB ADHK 2010 di kabupaten/kota Provinsi Jambi wilayah timur dan barat mampu diamati pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.3 PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur dan Barat Tahun 2017-2022 (Milyar Rupiah)**

Wilayah Bagian	Kabupaten/Kota	PDRB (Rp Milyar)						Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Jambi Wilayah Timur	Batang Hari	10.634	11.148	11.713	11.668	12.221	13.728	11.852
	Muaro Jambi	14.655	15.390	16.127	16.187	16.847	18.179	16.231
	Tanjabtlim	16.748	17.241	17.968	17.263	17.285	17.472	17.329
	Tanjabbar	27.422	29.279	30.745	30.559	30.976	31.866	30.141
	Kota Jambi	17728	18.668	19.551	18.776	19.515	20.543	19.130
	<b>Total</b>		<b>87.187</b>	<b>91.726</b>	<b>96.104</b>	<b>94.453</b>	<b>96.844</b>	<b>101.788</b>
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	5.784	6.070	6.327	6.571	6.844	12.255	7.308
	Merangin	8.947	9.388	9.787	9.869	10.372	10.672	9.839
	Sarolangun	9.809	10.280	10.718	10.691	11.398	11.656	10.758
	Tebo	9.239	9.700	10.161	10.159	10.597	11.260	10.186
	Bungo	11.510	12.046	12.550	12.494	13.134	13.734	12.578
	Kota Sungai Penuh	4.184	4.388	4.608	4.600	4.769	4.981	4.588
	<b>Total</b>		<b>49.473</b>	<b>51.872</b>	<b>54.151</b>	<b>54.384</b>	<b>57.114</b>	<b>64.558</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2024

Menurut tabel 4.3 terlihat bahwasanya setiap wilayah memiliki nilai PDRB ADHK 2010 yang berbeda-beda. Untuk total PDRB ADHK 2010 Provinsi Jambi wilayah timur memiliki total PDRB sebesar Rp. 94.684 milyar. Angka ini lebih besar dibanding total PDRB ADHK 2010 Provinsi Jambi wilayah barat yang memiliki nilai PDEB sebesar Rp. 55.259 milyar.

PDRB ADHK 2010 tertinggi yaitu di wilayah Tanjabbar dengan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp. 30.141 milyar. Hal ini dikarenakan Tanjabbar mungkin

mempunyai luas lahan yang cukup besar untuk pertanian dan perkebunan, khususnya kelapa sawit dan karet, yang mana ialah komoditas unggulan dan sumber pendapatan utama bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Adanya industri pengolahan hasil pertanian, seperti pabrik kelapa sawit dan pabrik karet, dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dan meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB daerah. Adanya investasi dan kemitraan strategis, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, dalam pembangunan infrastruktur dan industri dapat memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemudian PDRB ADHK 2010 terendah yaitu pada wilayah Kota Sungai Penuh dengan PDRB ADHK 2010 sebesar Rp. 4.588 milyar. Hal ini dikarenakan adanya kendala geografis dan topografi, seperti daerah yang sulit diakses atau topografi yang bergunung-gunung, dapat menghambat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan sektor-sektor tertentu. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dapat membatasi kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpendapatan tinggi. Kurangnya akses terhadap layanan keuangan formal, seperti bank dan lembaga keuangan mikro, dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengelola dan meningkatkan pendapatan mereka.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

## 5.1 Pertumbuhan Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat Dan Timur

### 5.1.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah semua orang yang berusia kerja dan memiliki kemampuan untuk bekerja dalam produksi barang atau jasa dalam suatu ekonomi. Tabel berikut menunjukkan perkembangan tenaga kerja di wilayah timur dan barat Provinsi Jambi:

**Tabel 5.1 Perkembangan Tenaga kerja Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023**

Wilayah Bagian	Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja							Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jambi Wilayah Timur	Batanghari	119290	122902	114399	128274	132611	124787	138564	125832
	Perkembangan (%)	-	3,03	-6,92	12,13	3,38	-5,90	11,04	2,79
	Muaro Jambi	180532	193969	183418	194705	202878	222447	220545	199785
	Perkembangan (%)	-	7,44	-5,44	6,15	4,20	9,65	-0,86	3,52
	Tanjab Timur	119009	114178	112079	119896	115517	119088	117848	116802
	Perkembangan (%)	-	-4,06	-1,84	6,97	-3,65	3,09	-1,04	-0,09
	Tanjab Barat	156851	174870	165862	179842	179622	172109	166336	170785
	Perkembangan (%)	-	11,49	-5,15	8,43	-0,12	-4,18	-3,35	1,18
	Kota Jambi	268264	276000	283575	265205	262974	276359	285317	273956
Perkembangan (%)	-	2,88	2,74	-6,48	-0,84	5,09	3,24	1,11	
	<b>Rata-Rata</b>								<b>1,70</b>
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	120538	127453	119958	127187	130965	136320	137302	128532
	Perkembangan (%)	-	5,74	-5,88	6,03	2,97	4,09	0,72	2,28
	Merangin	180842	186724	186863	190731	192138	193723	186400	188203
	Perkembangan (%)	-	3,25	0,07	2,07	0,74	0,82	-3,78	0,53
	Sarolangun	139970	135993	134967	141752	137204	143965	136619	138639
	Perkembangan (%)	-	-2,84	-0,75	5,03	-3,21	4,93	-5,10	-0,33
	Tebo	170293	174959	175417	180517	181524	183165	177198	177582
	Perkembangan (%)	-	2,74	0,26	2,91	0,56	0,90	-3,26	0,69
	Bungo	160485	172553	166055	168517	168355	183631	185999	172228
	Perkembangan (%)	-	7,52	-3,77	1,48	-0,10	9,07	1,29	2,58
	Sungai Penuh	41743	45298	40982	42377	43052	42225	50136	80519
Perkembangan (%)	-	8,52	-9,53	3,40	1,59	-1,92	18,74	3,47	
	<b>Rata-Rata</b>								<b>1,54</b>

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui tabel 5.1 mampu diamati bahwasanya tenaga kerja Provinsi Jambi sebelah Timur selama tahun 2017-2023 mempunyai kecenderungan melalui rata-rata sebanyak 1,70%. Untuk perkembangan tenaga kerja tertinggi ditemui pada

Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata sebanyak 3,52 persen. Tingginya perkembangan Tenaga kerja di Kota Jambi, yang menunjukkan adanya peningkatan investasi yang mendorong pengembangan industri di daerah tersebut. Industri seperti manufaktur, pertanian, dan perkebunan bisa menciptakan banyak lapangan kerja baru di Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan perkembangan tenaga kerja terendah terjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui rata-rata sebanyak -0,09 persen. Minimnya Tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diakibatkan rendahnya tingkat investasi dari sektor swasta maupun pemerintah dapat membatasi penciptaan lapangan kerja baru. Investor mungkin melihat daerah ini sebagai lokasi yang kurang menarik karena berbagai faktor, termasuk risiko ekonomi dan infrastruktur yang kurang berkembang. Selain itu ekonomi daerah ini didominasi oleh sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang rendah, maka potensi penciptaan lapangan kerja baru juga terbatas. Sektor pertanian yang kurang berkembang biasanya tidak mampu menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar atau memberikan pendapatan yang memadai.

Selanjutnya untuk perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi sebelah Barat sepanjang tahun 2017-2023 mempunyai kecenderungan naik melalui rata-rata sebanyak 1,54 persen. Pada perkembangan tenaga kerja tertinggi terjadi pada Kota Sungai Penuh melalui rata-rata sebanyak 3,47 persen. Tingginya perkembangan Tenaga kerja di Kota Sungai Penuh disebabkan oleh adanya pengembangan sektor pariwisata, yang mencakup destinasi wisata alam dan budaya, dapat membuka banyak peluang kerja di bidang perhotelan, restoran, transportasi, dan jasa lainnya. Sungai Penuh mungkin memiliki potensi pariwisata yang besar yang dieksploitasi secara efektif. Sedangkan perkembangan tenaga kerja terendah terjadi Kabupaten Sarolangun melalui rata-rata sebanyak -0,33 persen. Rendahnya perkembangan Tenaga kerja di Kabupaten Sarolangun disebabkan Tren migrasi penduduk dari daerah ini ke daerah lain yang menawarkan lebih banyak peluang kerja dapat mengurangi jumlah tenaga kerja lokal yang tersedia. Migrasi keluar sering terjadi jika daerah tersebut tidak menawarkan prospek pekerjaan yang baik atau kualitas hidup yang memadai.

### 5.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan yakni keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mempunyai akses yang memadai pada sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ini adalah masalah kompleks yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Jambi wilayah timur dan barat mampu diamati pada tabel berikut:

**Tabel 5.2 Tingkat kemiskinan Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023**

Wilayah Bagian	Wilayah	Tingkat Kemiskinan							Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jambi Wilayah Timur	Batanghari	10,33	10,23	9,75	9,65	10,05	9,63	9,45	9,87
	Muaro Jambi	4,37	4,05	3,83	3,83	4,53	4,47	4,43	4,22
	Tanjab Timur	12,58	12,38	11,54	10,95	11,39	10,91	10,85	11,51
	Tanjab Barat	11,32	11,1	10,56	10,29	10,75	10	9,79	10,54
	Kota Jambi	8,84	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33	8,24	8,47
	<b>Rata-Rata</b>								<b>8,92</b>
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	7,45	7,07	7,13	7,3	7,71	7,57	7,54	7,40
	Merangin	9,43	8,88	8,48	8,63	9,11	8,7	8,9	8,88
	Sarolangun	8,87	8,73	8,45	8,42	8,87	8,48	8,54	8,62
	Tebo	6,79	6,58	6,47	6,26	6,68	6,34	6,46	6,51
	Bungo	5,82	5,78	5,6	5,8	6,23	5,38	5,29	5,70
	Sungai Penuh	2,78	2,76	2,81	3,03	3,41	2,97	3,00	7,42
	Rata-Rata								<b>7,42</b>

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui tabel 5.2 mampu diamati bahwasanya tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sebelah Timur sepanjang tahun 2017-2023 cenderung naik dengan rata-rata sebesar 8,92%. Tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (11,51%) akibat distribusi pendapatan yang tidak merata dan kurangnya pekerjaan layak. Sebaliknya, tingkat kemiskinan terendah ada di Kabupaten Muaro Jambi (4,22%), berkat program bantuan sosial pemerintah dan pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Selanjutnya untuk tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sebelah Barat sepanjang tahun 2017-2023 cenderung naik melalui rata-rata sebanyak 7,42 persen. Untuk tingkat kemiskinan tertinggi ditemui pada Kabupaten Merangin melalui rata-rata sebesar 8,88 persen. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin disebabkan oleh perubahan harga komoditas pertanian, fluktuasi pasar global, dan krisis ekonomi dapat mengancam pendapatan rumah tangga yang rentan di Kabupaten Merangin. Ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan meningkatkan risiko kemiskinan. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah terjadi Kabupaten Bungo melalui rata-rata senilai 5,7 persen. Rendahnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Bungo disebabkan Kabupaten Bungo mungkin mempunyai sumber daya alam yang berlimpah, dan pengelolaan yang berkelanjutan mampu menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

### 5.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan produksi barang dan layanan yang diproduksi oleh sebuah negara atau wilayah selama periode tertentu disebut pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini biasanya diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencakup nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi selama periode tertentu. Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di wilayah timur dan barat Provinsi Jambi:

**Tabel 5.3 Pertumbuhan ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023**

Wilayah Bagian	Wilayah	Laju pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten / Kota (Persen)							Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jambi	Batanghari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	3,7	5,01

Wilayah Timur	Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	6,28	4,77
	Tanjab Timur	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	2,17	1,38
	Tanjab Barat	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,51	3,34
	Kota Jambi	4,68	5,3	4,73	-4,24	4,08	5,36	6,61	3,79
	Rata-Rata								<b>3,66</b>
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	5,73	4,70
	Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	5,28	4,51
	Sarolangun	4,68	4,8	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,02	4,41
	Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,3	6,3	4,5	4,34
	Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	4,66	4,06
	Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45	4,92	4,40
	Rata-Rata								<b>4,40</b>

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui tabel 5.3 mampu diamati bahwasanya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sebelah Timur sepanjang tahun 2017-2023 cenderung naik dengan rata-rata sebesar 3,66%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Kabupaten Batanghari melalui rata-rata 5,01 persen, didorong oleh potensi pertanian yang berkembang melalui teknologi modern dan diversifikasi tanaman. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pertumbuhan terendah sebanyak 1,38 persen, akibat ketergantungan pada sektor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Pertumbuhan ekonomi wilayah Barat Provinsi Jambi 2017-2023 rata-rata 4,4 persen. Kabupaten Kerinci mencatat pertumbuhan tertinggi 4,7 persen berkat pemanfaatan sumber daya alam dan potensi wisata. Sementara itu, Kabupaten Bungo memiliki pertumbuhan terendah 4,06 persen akibat rendahnya produktivitas sektor pertanian dan kurangnya diversifikasi ekonomi.

#### 5.1.4 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yakni perbedaan distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu atau kelompok pada sebuah masyarakat. Ketimpangan ini mencerminkan sejauh mana pendapatan atau kekayaan tidak tersebar secara merata. Biasanya, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan beberapa alat atau indeks, seperti Koefisien Gini, rasio Palma, atau distribusi persentil. Untuk penelitian ini menggunakan indeks gini rasio. Untuk mengetahui

kondisi gini rasio pada kabupaten/kota Provinsi Jambi wilayah timur dan barat mampu diamati pada tabel berikut:

**Tabel 5.4 Kondisi Gini Rasio Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur Dan Barat Tahun 2017-2023**

Wilayah Bagian	Kabupaten/Kota	Gini rasio Kabupaten /Kota							Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jambi Wilayah Timur	Batanghari	0,25	0,3	0,31	0,32	0,31	0,29	0,36	0,31
	Muaro Jambi	0,32	0,31	0,29	0,28	0,32	0,27	0,34	0,30
	Tanjab Timur	0,28	0,29	0,29	0,25	0,25	0,27	0,31	0,28
	Tanjab Barat	0,29	0,36	0,28	0,28	0,25	0,26	0,32	0,29
	Kota Jambi	0,39	0,33	0,34	0,34	0,35	0,36	0,37	0,35
	<b>Rata-Rata</b>								<b>0,31</b>
Jambi Wilayah Barat	Kerinci	0,28	0,32	0,29	0,28	0,28	0,28	0,3	0,29
	Merangin	0,3	0,35	0,31	0,32	0,29	0,35	0,36	0,33
	Sarolangun	0,36	0,29	0,27	0,31	0,32	0,3	0,38	0,32
	Tebo	0,27	0,31	0,26	0,3	0,3	0,3	0,24	0,28
	Bungo	0,34	0,32	0,33	0,31	0,3	0,32	0,28	0,31
	Sungai Penuh	0,32	0,3	0,33	0,31	0,31	0,29	0,31	0,31
	<b>Rata-Rata</b>								<b>0,31</b>

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui tabel 5.4 mampu diamati bahwasanya gini rasio Provinsi Jambi sebelah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung naik melalui rata-rata sebesar 0,31. Untuk gini rasio tertinggi terjadi pada Kota Jambi melalui rata-rata indeks rasio gini senilai 0,35. Tingginya Gini rasio di Kota Jambi, yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan, disebabkan oleh adanya perbedaan upah dan peluang kerja antara sektor formal dan informal. Pekerja di sektor informal sering kali menerima pendapatan yang lebih rendah dan kurang stabil daripada mereka yang bekerja di sektor formal. Kemudian adanya urbanisasi yang cepat tanpa diimbangi dengan perencanaan dan penyediaan lapangan kerja yang memadai dapat menyebabkan munculnya daerah kumuh dan ketimpangan pendapatan yang tinggi antara penduduk kota yang kaya dan miskin. Sedangkan gini rasio terendah terjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui rata-rata sebesar 0,28. Rendahnya Gini rasio di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwasanya pendapatan di wilayah tersebut lebih merata

dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mungkin memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian atau sektor primer lainnya yang cenderung memberikan distribusi pendapatan yang lebih merata. Di sektor ini, banyak penduduk bekerja sebagai petani atau pekerja di sektor perkebunan, yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih merata.

Selanjutnya untuk gini rasio Provinsi Jambi sebelah Barat selama tahun 2017-2023 cenderung naik melalui rata-rata sebesar 0,31. Untuk gini rasio tertinggi terjadi pada Kabupaten Merangin melalui rata-rata indeks rasio gini sebesar 0,33. Tingginya Gini rasio di Kabupaten Merangin, yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang signifikan, disebabkan oleh adanya ekonomi Kabupaten Merangin didominasi oleh sektor-sektor tertentu seperti pertambangan atau perkebunan besar, mungkin terjadi ketimpangan yang besar antara pekerja di sektor tersebut dan mereka yang bekerja di sektor informal atau pertanian skala kecil. Sedangkan gini rasio terendah terjadi Kabupaten Tebo dengan rata-rata sebesar 0,28. Rendahnya Gini rasio di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa pendapatan di wilayah tersebut lebih merata dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Tebo mungkin memiliki ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian atau sektor primer lainnya. Pekerjaan di sektor ini sering kali menghasilkan pendapatan yang lebih merata di antara masyarakat, karena banyak penduduk bekerja sebagai petani atau di perkebunan.

## **5.2 Pengaruh Tenaga kerja, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat**

Bagian ini membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tenaga kerja berdampak pada ketimpangan pendapatan di kabupaten dan kota di wilayah barat Provinsi Jambi. Untuk analisis ini, metode regresi data panel digunakan. Ini menggabungkan data time series tahunan dari 2017 hingga 2023 dengan data cross-section dari enam kabupaten atau kota yang termasuk dalam wilayah tersebut. Ketimpangan pendapatan adalah variabel dependen, sedangkan tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi adalah variabel independen.

*Chow Test* (Uji Chow) dijalankan guna membandingkan/menentukan model mana yang terbaik antara PLS dan FEM.

**Tabel 5.5 Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.317600	(5,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	67.491389	5	0.0000

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Hasil dari program Eviews menunjukkan bahwa uji F dan uji Chi-Square keduanya signifikan, karena keduanya memiliki probabilitas 0,0000 dan 0,0000 yang lebih rendah dari ambang batas 0,1 persen. Hipotesis  $H_0$  model ditolak, dan hipotesis  $H_1$  diterima. Atas dasar ini, saya dapat mengatakan bahwa model FEM lebih baik daripada model PLS. Uji Hausman akan membandingkan metode FEM dan REM.

Uji Hausman digunakan untuk membandingkan dan menentukan model terbaik antara FEM dan REM.

**Tabel 5.6 Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM**

Uji Hausman  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.567305	3	0.0000

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Menurut keluaran Eviews terlihat bahwasanya nilai statistik Chi-Square mempunyai probabilitas yang lebih rendah dari nilai alpha sebesar 0,1 persen (0,0000 di bawah 0,1). Atas dasar tersebut, hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_1$  diterima. Alhasil mampu berkesimpulan bahwasanya model FEM lebih unggul daripada model REM.

Berdasarkan temuan uji Chow dan uji Hausmann, model FEM ialah model yang paling efektif; atas dasar ini, model FEM akan menjadi model untuk penelitian ini.

### 5.2.1 Estimasi Model FEM

**a. Estimasi Koefisien Variable Model FEM**

Berikut ini adalah hasil estimasi persamaan data panel mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tenaga kerja pada ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat:

**Tabel 5.7 Hasil Estimasi *Fixed Effects Model* (FEM)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.143500	0.030815	4.656885	0.0001
TK?	2.57E-07	1.36E-07	1.886083	0.0681
KM?	0.015127	0.001480	10.21892	0.0000
PE?	-0.001060	0.000894	-1.185933	0.2441
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI—C	0.027764			
_MERANGIN—C	-0.014638			
_SAROLANGUN—C	-0.027216			
_TEBO—C	0.000711			
_BUNGO—C	0.007257			
_SUNGAIPENUH—C	0.006122			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.944669	Mean dependent var		0.283571
Adjusted R-squared	0.931256	S.D. dependent var		0.018455
S.E. of regression	0.004839	Akaike info criterion		-7.636903
Sum squared resid	0.000773	Schwarz criterion		-7.264546
Log likelihood	169.3750	Hannan-Quinn criter.		-7.500420
F-statistic	70.42695	Durbin-Watson stat		1.283337
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Penjelasan mengenai setiap variabel dalam penelitian ini, yaitu pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan perkembangan ekonomi terhadap ketidaksamaan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat, dapat diilustrasikan dengan model persamaan berikut. Penjelasan ini didasari oleh hasil estimasi yang diperoleh dan tercantum dalam tabel 5.7:

$$KP_{it} = 0,143500 + 0,000000257TK + 0,015127KM - 0,001060PE + e$$

$$Prob = (0,0001) \quad (0,0681) \quad (0,0000) \quad (0,2441)$$

Dengan menggunakan persamaan model yang telah ditunjukkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa temuan estimasi fixed effect adalah nilai konstanta sebesar

0,143500 jika terjadi pergeseran antara pekerja, kemiskinan, dan perkembangan ekonomi baik di berbagai daerah maupun seiring waktu. Hal ini terjadi terlepas dari apakah perubahan terjadi seiring waktu atau antar wilayah. Hal ini menunjukkan disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat sebesar 0,143500 persen dengan catatan tenaga kerja, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi tidak mengalami perubahan.

Dengan menggunakan persamaan model yang telah ditunjukkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa temuan estimasi fixed effect adalah nilai konstanta sebesar 0,143500 jika terjadi perubahan antara tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi baik antar wilayah maupun antar waktu. Hal ini terjadi terlepas dari apakah perubahan terjadi seiring waktu atau antar wilayah. Hal ini menunjukkan disparitas pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat senilai 0,143500 persen dengan catatan angkatan kerja, indeks kemiskinan, dan indeks pembangunan tidak mengalami perubahan.

1. Koefisien tenaga kerja yang saya peroleh adalah 0,000000257, dan variabelnya tidak berubah atau konsisten. Ini berarti bahwa tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat juga bertambah sebesar 0,000000257 persen setiap kali ada kenaikan satu individu.
2. Nilai koefisien Kemiskinan senilai 0,015127 dan variable tetap atau konstan Jadi mampu diinterpretasikan sewaktu kemiskinan naik sebesar satu persen alhasil ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat juga naik senilai 0,015127 persen.
3. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi senilai -0,001060, variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai dampak yang besar pada ketimpangan pendapatan; oleh karena itu, koefisien variabel ini tidak dapat dijelaskan.

#### **b. Estimasi Koefisien Model FEM Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat**

Hasil dari temuan estimasi yang diperoleh melalui penggunaan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan bahwasanya nilai intersep setiap kabupaten dan kota

dalam Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat berbeda satu sama lain. Tabel berikut memberikan ilustrasi masing-masing *Fixed Effect*:

**Tabel 5.8 Fixed Effect Estimasi Model FEM**

Kabupaten/Kota	Fixed Effect
Kerinci	0.027764
Merangin	-0.014638
Sarolangun	-0.027216
Tebo	0.000711
Bungo	0.007257
Sungai Penuh	0.006122

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Estimasi menunjukkan bahwa nilai Fixed effect yang berasal dari metode FEM adalah sebagai berikut:

1. Kerinci

Wilayah Kerinci memberikan kontribusi individu sebesar 0,027764 persen terhadap ketidakmerataan pendapatan di daerah-daerah di wilayah barat Provinsi Jambi. Kontribusi ini terkait dengan perbedaan dalam dinamika tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, yang ditelaah dari sudut pandang regional dan waktu.

2. Merangin

Di Kabupaten Merangin, pergeseran yang sama dalam tenaga kerja, kemiskinan, dan perkembangan ekonomi memberikan dampak individual terhadap ketidaksetaraan pendapatan di Wilayah Barat Provinsi Jambi sebesar -0,014638 persen.

3. Sarolangun

Perubahan dalam tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun berdampak secara individu terhadap ketidakmerataan pendapatan di Wilayah Barat Provinsi Jambi dengan nilai -0,027216 persen.

4. Tebo

Perubahan pada variabel tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, baik di lintas wilayah maupun waktu, memberikan pengaruh

spesifik terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tebo sebesar 0,000711 persen.

5. Bungo

Kabupaten Bungo mengalami dampak individu sebesar 0,007257 persen terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Barat Provinsi Jambi akibat perubahan pada tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, baik antar wilayah maupun waktu.

6. Sungai Penuh

Perubahan dalam tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi, baik lintas wilayah maupun waktu, memberikan dampak spesifik pada Kota Sungai Penuh sebesar -0,006122 persen terhadap ketimpangan pendapatan.

### 5.2.2 Uji Hipotesis

#### 1. Uji $R^2$

Perkiraan dari model FEM menunjukkan nilai R-Kuadrat sebesar 0,944669. Faktor-faktor tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi sebesar 94,95 persen terhadap perbedaan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi di Wilayah Barat, sedangkan sisa 5,05 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diperiksa dalam studi ini.

#### 2. Uji F Statistik

Hasil yang diperoleh dari model FEM menunjukkan bahwa nilai Prob (f Statistik) adalah 0,00000, yang kurang dari 0,1. Hasil ini mengarah pada penolakan hipotesis nol ( $H_0$ ) dan penerimaan hipotesis alternatif ( $H_a$ ). Uji kombinasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tenaga kerja secara signifikan mempengaruhi ketidaksetaraan. Individu yang tinggal di wilayah barat Provinsi Jambi.

#### 3. Uji t Statistik

Uji t statistik dipakai untuk menilai pengaruh tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesenjangan pendapatan di daerah Kabupaten dan

Kota Provinsi Jambi di bagian Barat. Uji t statistik merupakan alat yang bermanfaat untuk menentukan seberapa besar masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen jika dibandingkan dengan variabel yang lain. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, tingkat kepercayaan yang setara dengan sembilan puluh persen memiliki kemungkinan sebesar 0,1.

**Tabel 5.9. Nilai t Statistik Pada Metode FEM**

Variabel	Prob.	Keterangan
Tenaga kerja	0,0681	Signifikan
Kemiskinan	0,0000	Signifikan
pertumbuhan ekonomi	0,2441	Tidak Signifikan

Sumber: Data Diolah, Eviews 09 (2023)

Tabel 5.9 menyajikan hasil uji-t statistik sebagai berikut:

1. H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima karena nilai probabilitas berada di bawah 0,1, yaitu 0,0681. Faktor tenaga kerja memiliki efek signifikan terhadap perbedaan pendapatan di berbagai daerah dan kota di bagian barat Provinsi Jambi.
2. H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima ketika probabilitas dipandang 0,0000, karena nilainya di bawah 0,1. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah barat Provinsi Jambi.
3. Dengan mempertimbangkan nilai probabilitas pertumbuhan ekonomi yang sebesar 0,2441, yang lebih tinggi dari 0,1, hipotesis nol (H<sub>0</sub>) diterima dan hipotesis alternatif (H<sub>a</sub>) ditolak. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak signifikan terhadap ketidakseimbangan pendapatan di bagian barat Provinsi Jambi.

### **5.3 Pengaruh Tenaga kerja, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur**

Melalui pemanfaatan perhitungan regresi data panel, khususnya tahun 2017-2023, dan cross section sebagai objek datanya, pada bagian ini akan

memberikan penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tenaga kerja, kemiskinan, dan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi berdampak pada ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang terletak di Wilayah Timur. Cakupannya meliputi lima kabupaten dan kota yang berada di Jambi Wilayah Timur. Variabel Tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor independen yang berperan dalam hal ini, dan ketimpangan pendapatan merupakan variabel dependen yang dipertimbangkan.

Uji Chow (Chow Test) dijalankan dalam membandingkan dan memilih model yang lebih unggul dari PLS dan FEM..

**Tabel 5.10 Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM**

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.228437	(4,27)	0.3222
Cross-section Chi-square	5.852001	4	0.2105

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Menurut hasil program Eviews menunjukkan uji F dan uji Chi-Square sama-sama signifikan (probabilitas 0,2105 lebih tinggi dari alpha 0,1 persen) yang berarti hipotesis Ho model ini adalah diterima sedangkan hipotesis H1 ditolak. Oleh karena itu, mampu berkesimpulan bahwasanya model PLS lebih unggul daripada model FEM. Selanjutnya akan dijalankan uji hasuman dalam mengevaluasi pendekatan FEM dan REM dibandingkan satu sama lain.. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model mana yang lebih cocok di antara FEM dan REM.

**Tabel 5.11 Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.756296	3	0.8599

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Output dari Eviews menunjukkan bahwa nilai statistik Chi-Square memiliki probabilitas yang melebihi alpha, yaitu sebesar 0,1 persen ( $0,8599 > 0,1$ ). Dengan demikian, hipotesis H0 diterima dan hipotesis H1 ditolak. Hasilnya, dapat disimpulkan bahwa model REM lebih unggul daripada model FEM. Selanjutnya, dilakukan evaluasi menggunakan Lagrange Multiplier Test untuk memastikan keunggulan antara kedua metode tersebut, yaitu PLS atau REM. Melalui penggunaan uji Lagrange Multiplier, dijalankan perbandingan dan pemilihan model yang paling efektif antara PLS dan REM.

**Tabel 5.12 Uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara model PLS dengan REM**

Lagrange multiplier (LM) test for panel data

Date: 05/12/24 Time: 21:05

Sample: 2019 2023

Total panel observations: 25

Probability in ( )

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.685918	0.620122	1.306040
	(0.4076)	(0.4310)	(0.2531)
Honda	-0.828202	-0.787478	-1.142458
	(0.7962)	(0.7845)	(0.8734)
King-Wu	-0.828202	-0.787478	-1.142458
	(0.7962)	(0.7845)	(0.8734)
GHM	--	--	0.000000
	--	--	(0.7500)

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Berdasarkan temuan keluaran yang ditunjukkan sebelumnya, nilai probabilitas Breusch-Pagan (BP) yakni 0,2531 (dapat ditemukan pada kolom ketiga yang diberi label “both”). Jika probabilitas BP (0,2531) melebihi 0,1, maka hipotesis nol (H0) diterima; atau dapat dikatakan model PLS adalah model yang tepat untuk digunakan.

Temuan uji Chow, uji Hausmann, dan uji Lagrange multiplier menunjukkan bahwa model PLS merupakan model yang paling kerap muncul. Oleh karena itu, model PLS akan digunakan menjadi model pada penelitian ini.

### 5.3.1 Estimasi Model PLS

**a. Estimasi Koefisien Variabel dalam Model PLS**

Hasil analisis data panel mengenai dampak dari tenaga kerja, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketidakmerataan pendapatan di daerah Kabupaten serta Kota di wilayah timur Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.13 Hasil Estimasi PLS**

Dependent Variable: KP  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/12/24 Time: 22:01  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.194593	0.007900	24.63145	0.0000
TK	3.03E-07	8.67E-08	3.489372	0.0022
KM	0.005821	0.000831	7.008592	0.0000
PE	0.000212	0.000360	0.587639	0.5630
R-squared	0.939032	Mean dependent var		0.276400
Adjusted R-squared	0.930322	S.D. dependent var		0.022338
S.E. of regression	0.005897	Akaike info criterion		-7.283251
Sum squared resid	0.000730	Schwarz criterion		-7.088231
Log likelihood	95.04064	Hannan-Quinn criter.		-7.229161
F-statistic	107.8138	Durbin-Watson stat		0.780629
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Menurut hasil estimasi yang disajikan pada tabel 5.13, dapat diketahui bahwa persamaan model dapat memberikan penjelasan terhadap setiap variabel dalam penelitian. Secara spesifik pengaruh tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur dapat dijelaskan melalui persamaan berikut:

$$KP_{it} = 0,194593 + 0,000000303TK + 0,005821KM + 0,000212PE + e$$

$$Prob = (0,0000) \quad (0,0022) \quad (0,0000) \quad (0,5630)$$

Menurut persamaan model yang telah disajikan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa perkiraan temuan PLS adalah sebagai berikut: bilamana terjadi perubahan antara ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi baik antar wilayah ataupun dari waktu ke waktu, alhasil nilai konstanta senilai -

0,194593. Hal ini menunjukkan bahwa bilamana faktor tenaga kerja, kemiskinan, dan indeks pembangunan tidak berubah, alhasil ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur senilai 0,194593 persen.

1. Nilai koefisien tenaga kerja senilai 0,000000303 dan variable tetap atau konstan alhasil mampu diinterpretasikan sewaktu tenaga kerja naik satu orang maka Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur ikut meningkat sebesar 0,000000303 persen.
2. Nilai koefisien Kemiskinan senilai 0,005821 dan variable tetap atau konstan alhasil mampu diinterpretasikan sewaktu Kemiskinan naik satu persen maka Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur ikut meningkat sebesar 0,005821 persen.
3. Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000212; Namun demikian, variabel pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan, membuat koefisiennya tidak dapat dijelaskan.

### **5.3.2 Uji Hipotesis**

#### **1. Uji R<sup>2</sup>**

Hasil estimasi model PLS menunjukkan nilai R-Kuadrat 0,939032. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kesenjangan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur sebesar 93,90 persen, sedangkan variabel lain yang tidak berhubungan dengan penelitian ini mempunyai pengaruh sebesar 6,1 persen.

#### **2. Uji F Statistik**

Dari hasil estimasi model PLS diketahui nilai probabilitas f statistik senilai 0,000000 kurang dari 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya hipotesis nol (Ho) ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pengujian secara keseluruhan memperlihatkan bahwasanya faktor ketenagakerjaan, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi membawa dampak yang signifikan pada ketimpangan secara simultan. jumlah uang yang diperoleh di Wilayah Timur Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

#### **3. Uji t Statistik**

Penerapan uji statistik t digunakan untuk menilai secara parsial relevansi pengaruh tenaga kerja, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi pada ketimpangan pendapatan pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Timur Provinsi Jambi. Uji t statistik berguna dalam menentukan sejauh mana setiap variabel independen mempunyai dampak pada variabel dependen dibandingkan dengan variabel lainnya. Seperti terlihat pada tabel berikut, derajat kepercayaan sembilan puluh persen adalah 0,1.

**Tabel 5.14. Nilai t Statistik Pada Metode PLS**

Variabel	Prob.	Keterangan
Tenaga kerja	0,0022	Signifikan
Kemiskinan	0,0000	Signifikan
pertumbuhan ekonomi	0,5630	Tidak Signifikan

Sumber: Data Diolah, Eviews 09 (2024)

Menurut tabel 5.14 mampu diinterpretasikan hasil uji t statistik seperti berikut:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ) tidak diterima dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima, karena angka probabilitas 0,0022 berada di bawah 0,1. Tenaga kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan di berbagai daerah dan kota di Wilayah Timur Provinsi Jambi.
2. Ketika probabilitas (Prob) mencapai 0,0000 yang kurang dari 0,1, hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diambil. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki dampak yang besar terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah timur Provinsi Jambi.
3. Dengan mempertimbangkan bahwa probabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5630, yang menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar dari 0,1,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di wilayah timur Provinsi Jambi.

## 5.4 Analisis Ekonomi

### 5.4.1 Perkembangan Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Barat Dan Timur

Perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi wilayah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,70 persen dengan perkembangan tenaga kerja tertinggi terjadi pada Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata sebesar 3,52 persen. Sedangkan perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi wilayah Barat selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,54 persen. Untuk perkembangan tenaga kerja tertinggi terjadi pada Kota Sungai Penuh dengan rata-rata sebesar 3,47 persen. Untuk rata-rata perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi wilayah Timur ternyata lebih besar dibandingkan perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi wilayah Barat. Meningkatnya jumlah tenaga kerja setiap tahunnya dikarenakan tingginya permintaan dan penawaran tenaga kerja (Arida et al., 2015).

Selanjutnya untuk tingkat kemiskinan Provinsi Jambi wilayah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 8,92% dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rata-rata sebesar 11,51 persen. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Provinsi Jambi wilayah Barat selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 7,42 persen dan tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Kabupaten Merangin dengan rata-rata sebesar 8,88 persen. Berdasarkan rata-rata tingkat kemiskinan tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jambi wilayah Timur memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jambi wilayah Barat. Semakin tinggi tingkat kemiskinan menunjukkan semakin besar ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut (Kunenengan et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi wilayah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 3,66%. Untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Batanghari dengan rata-rata sebesar 5,01 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi wilayah Barat selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 4,4 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Kerinci dengan rata-rata sebesar 4,7 persen. Berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa Provinsi Jambi wilayah

Barat memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jambi wilayah Timur. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka ketimpangan pendapatan akan semakin menurun (Kunenengan et al., 2023).

Gini rasio Provinsi Jambi wilayah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,31. Untuk gini rasio tertinggi terjadi pada Kota Jambi dengan rata-rata indeks rasio gini sebesar 0,35. Sedangkan gini rasio Provinsi Jambi wilayah Barat selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,31. Untuk gini rasio tertinggi terjadi pada Kabupaten Merangin dengan rata-rata indeks rasio gini sebesar 0,33. Secara rata-rata, gini rasio Provinsi Jambi wilayah Timur memiliki nilai yang sama dengan gini rasio Provinsi Jambi wilayah Barat. Namun untuk wilayah dengan gini rasio tertinggi terjadi di Provinsi Jambi wilayah Timur dengan indeks rasio gini sebesar 0,35. Semakin kecil angka gini rasio menunjukkan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan di daerah tersebut (Rusdarti, 2015).

#### **5.4.2 Pengaruh Tenaga kerja, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi Wilayah Barat**

Berdasarkan temuan dari penelitian mampu dilihat bahwa tenaga kerja membawa dampak signifikan pada Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi wilayah barat. Temuan dari penelitian ini sependapat dengan penelitian Desi (2015) dan (Setiani, 2015) yang mengatakan tenaga kerja membawa dampak signifikan pada Ketimpangan pendapatan. Berpengaruhnya tenaga kerja pada Ketimpangan pendapatan dikarenakan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, pekerja dengan keterampilan dan pendidikan yang rendah biasanya memperoleh upah yang lebih rendah. Ketimpangan dalam akses pendidikan dan pelatihan keterampilan menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam pendapatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi, yang terletak di daerah barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kunenengan et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi

ketimpangan pendapatan secara signifikan. Berpengaruhnya kemiskinan pada Ketimpangan pendapatan dikarenakan Kemiskinan sering kali dikaitkan dengan kondisi kesehatan dan gizi yang buruk. Kesehatan yang buruk dapat menghambat kemampuan seseorang untuk bekerja secara produktif atau bahkan mengakses peluang pekerjaan, sehingga pendapatan mereka tetap rendah dan memperburuk ketimpangan pendapatan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara signifikan di Provinsi Jambi, yang terletak di wilayah barat. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kunenengan et al. (2023), yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Tidak Berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi pada Ketimpangan pendapatan dikarenakan pertumbuhan tersebut mungkin tidak tersebar secara merata di seluruh populasi. Pertumbuhan ekonomi bisa terkonsentrasi pada kelompok kaya atau sektor tertentu tanpa memberikan dampak signifikan pada pendapatan kelompok berpenghasilan rendah.

#### **5.4.3 Pengaruh Tenaga kerja, Kemiskinan dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Wilayah Timur**

Menurut temuan dari penelitian dapat dilihat bahwa tenaga kerja membawa dampak signifikan pada Ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi wilayah timur. Temuan dari penelitian ini sependapat dengan penelitian Desi (2015) dan Setiani (2015) yang mengatakan tenaga kerja berpengaruh signifikan pada Ketimpangan pendapatan. Berpengaruhnya tenaga kerja pada Ketimpangan pendapatan dikarenakan di wilayah timur Provinsi Jambi, perbedaan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dapat menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Akses yang terbatas ke pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan membuat sebagian besar tenaga kerja di wilayah ini hanya dapat mengakses pekerjaan dengan upah rendah.

Berdasarkan hasil studi, terlihat bahwa kemiskinan memberikan efek besar terhadap ketidakmerataan pendapatan di Provinsi Jambi bagian timur. Temuan ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kunenengan dan rekan-rekan (2023) yang menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berpengaruhnya kemiskinan pada Ketimpangan pendapatan dikarenakan Kurangnya dukungan ekonomi dan sosial ini membatasi kemampuan individu untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan yang lebih baik, sehingga mempertahankan atau memperburuk ketimpangan pendapatan.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh cukup besar terhadap perbedaan pendapatan di daerah Jambi Wilayah Timur. Hasil ini bertentangan dengan temuan yang dibuat oleh Kunenengan dan rekan-rekannya (2023), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek yang signifikan pada ketidakmerataan pendapatan. Tidak adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan disebabkan oleh kenyataan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut lebih banyak dirasakan oleh kalangan kaya atau sektor tertentu, sementara mereka yang berpenghasilan rendah dan daerah-daerah miskin tidak melihat peningkatan yang berarti dalam pendapatan mereka.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Menurut temuan dari pembahasan, maka mampu berkesimpulan yaitu seperti berikut :

1. Perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi sebelah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung naik melalui rata-rata sebanyak 1,70%. Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja Provinsi Jambi sebelah Barat sepanjang tahun 2017-2023 cenderung naik dengan rata-rata sebanyak 1,54 persen.

Selanjutnya perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sebelah Timur selama tahun 2017-2023 cenderung naik dengan rata-rata sebanyak 8,92%. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Provinsi Jambi sebelah Barat Sepanjang periode 2017 hingga 2023, angka pertumbuhan menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata 7,42 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi bagian Timur selama tahun 2017-2023 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata 3,66 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi bagian Barat selama tahun 2017-2023 juga mengalami kenaikan dengan rata-rata 4,4 persen. Perkembangan rasio gini di Provinsi Jambi bagian Timur selama tahun 2017-2023 menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata 0,31. Sedangkan untuk gini rasio Provinsi Jambi sebelah Barat selama tahun 2017-2023 cenderung naik dengan rata-rata sebesar 0,31.

2. Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan di area Jambi Wilayah Barat antara tahun 2017 dan 2023. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jambi Wilayah Barat tidak memberikan dampak yang berarti terhadap kesenjangan pendapatan dari tahun 2017 sampai 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja dan taraf hidup yang rendah memiliki dampak signifikan pada ketimpangan pendapatan di Jambi Wilayah Timur antara tahun 2017 hingga 2023. Sejak tahun 2017, perkembangan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap kesenjangan pendapatan di Jambi Wilayah Timur.

## **6.2 Saran**

Menurut kesimpulan tersebut, maka mampu diajukan masukan-masukan berupa saran yakni seperti berikut :

1. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di wilayah timur Jambi, diperlukan intervensi yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, investasi dalam infrastruktur, promosi diversifikasi ekonomi, penguatan serikat pekerja, serta kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan inklusivitas di tempat kerja.

2. Mengatasi pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah timur Jambi memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan, investasi dalam kesehatan dan infrastruktur, penyediaan akses ke modal dan kredit, serta kebijakan yang mendukung inklusivitas dan kesetaraan..
3. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah timur Jambi, diperlukan kebijakan yang memastikan distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi secara lebih merata. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur, kebijakan redistributif yang kuat, serta upaya untuk mengatasi diskriminasi dan memastikan inklusivitas dalam pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adit. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1).
- Afrida. (2011). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia.
- Andriani, Y., & Sukmawati, N. (2022). Kemiskinan Dalam Naskah Hah Karya Putu Wijaya ( Tinjauan Sosiologi Sastra ). *Jurnal Humaniora*, 18(1).
- Arida, A., Zakiah, & Jualini. (2015). Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Agrisep*, 16(1), 66–78.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN.
- Astuti. (2015a). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2).
- Astuti. (2015b). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2).
- Badan Pusat Statistik, B. (2020). *Profil Kemiskinan Di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (2011). *Rencana Aksi Nasional Pangan Dan Gizi 2011-2015*. Bappenas Republik Indonesia.
- Desi. (2015). Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2).
- Dwi, R. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jateng Tahun 2005-2008. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1).
- Fatkul. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ilmu Ekonomi Brawijaya*, 4(3).
- Gujarati. (2012). *Dasar-dasar ekonometrika* (6th ed.). Salemba Empat.
- Hajiji, A. (2010). *Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Riau 2002-2008*. [Http://Respository.Itb.Ac.Id](http://Respository.Itb.Ac.Id) <http://respository.itb.ac.id>
- Hapsoro. (2013). Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional Terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan Di Indonesia Dalam Periode 2007-2010. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2).

- Haughton, J., & Khander, S. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Salemba Empat.
- Jhingan, M. . (2016). *The Economics of Development and Planning*. Nisha Entreprises.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka CIDESINDO.
- Kumalasari, M., & Poerwono, D. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata - Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal UNDIP*, 15(2), 1–23.
- Kuncoro. (2012). *Pengertian Kemiskinan*. YKPM.
- Kunenengan, R. M. ., Engka, D. S. ., & Rorong, I. P. . (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Lima Kabupaten/Kota di Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(3), 133–144.
- Mankiw. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Musfidar, M. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan tahun 2001-2010*. Universitas Hasanuddin.
- Mustika, C., Nurjanah, R., & Wulan, S. K. (2023). Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1533. <https://doi.org/10.29210/020231686>
- Nachrowi, D., & Usman, H. (2012). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasution, D. Q., Yulmardi, & Hardiani. (2018). Studi tentang kemiskinan di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 79–90.
- Niyimbanira, F. (2017). Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial*, 7(4), 254–261.
- Padriyansyah, P., & Syahputera, R. (2022). Analisis Pdrb, Ipm Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4567>
- Purnamawati, I. G. A. (2021). *Ekonomi Makro Teori dan Kebijakan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Putra. (2011). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar

- Kabupaten di Kalimantan Timur. *Journal of Economics and Policy*, 8(1).
- Rahardja, & Manurung. (2006). *Teori Ekonomi Mikro. Edisi Ketiga*. LP Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Retnosari. (2012). *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Rivai. (2014). Melakukan Penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi2*, 4(3).
- Rosmeli, R., & Nurhayani, N. (2014). Studi Komperatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia Dan Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 3(1), 456–463. <https://doi.org/10.22437/jmk.v3i1.1861>
- Rusdarti. (2015). Meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 19(1).
- Sanusi, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis. Cetakan Keempat*. Salemba Empat.
- Sayed, A., & Peng, B. (2020). Pandemics and income inequality: a historical review. *Business & Economics*, 1(54).
- Setiani. (2015). *Penerapan Regresi Spasial Untuk Pemodelan Ketimpangan di Indonesia Tahun 2013*. Universitas Islam Indonesia.
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UI.
- Soepomo, I. (2010). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djabatan.
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. Raja Grafindo.
- Suliswanto. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) Dan Indeks Pembangunan Manusal (IPM) Terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ekobis 2010*, 1(1).
- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Suryono, A. (2010). *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. UB Press.
- Todaro, Michael, P., & Smith, S. C. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Winarno, W. . (2011). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. Edisi Ketiga, Cetakan pertama*. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Yacaoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Penagnguran terhadap Tingkat

Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, 8(3).

Yunanto, A. G. (2015). *Analisa Kemiskinan Struktural*.

Zulgani, Syaparuddin, Armandelis, & Amir, A. (2018). Poverty and Agriculture Development in Indonesia: Unfinishing Agenda. *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)*, 50(1), 122–132.

Kabupaten/Kota	Tahun	Gini Rasio	Tenaga Kerja	Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi
Batanghari	2017	0,25	119290	10,33	4,81
	2018	0,3	122902	10,23	4,83
	2019	0,31	114399	9,75	5,07
	2020	0,32	128274	9,65	-0,43
	2021	0,31	132611	10,05	4,85
	2022	0,29	124787	9,63	12,27
	2023	0,36	138564	9,45	3,7
Muaro Jambi	2017	0,32	180532	4,37	4,95
	2018	0,31	193969	4,05	5,01
	2019	0,29	183418	3,83	4,79
	2020	0,28	194705	3,83	0,35
	2021	0,32	202878	4,53	4,06
	2022	0,27	222447	4,47	7,97
	2023	0,34	220545	4,43	6,28
Tanjung Timur	2017	0,28	119009	12,58	3,07
	2018	0,29	114178	12,38	2,94
	2019	0,29	112079	11,54	4,21
	2020	0,25	119896	10,95	-3,44
	2021	0,25	115517	11,39	0,14
	2022	0,27	119088	10,91	0,57
	2023	0,31	117848	10,85	2,17
Tanjung Barat	2017	0,29	156851	11,32	4,48
	2018	0,36	174870	11,1	6,77
	2019	0,28	165862	10,56	5,01
	2020	0,28	179842	10,29	-0,29
	2021	0,25	179622	10,75	1,36
	2022	0,26	172109	10	2,56
	2023	0,32	166336	9,79	3,51
Kota Jambi	2017	0,39	268264	8,84	4,68
	2018	0,33	276000	8,49	5,3
	2019	0,34	283575	8,12	4,73
	2020	0,34	265205	8,27	-4,24
	2021	0,35	262974	9,02	4,08
	2022	0,36	276359	8,33	5,36
	2023	0,37	285317	8,24	6,61

Kabupaten/Kota	Tahun	Gini Rasio	Tenaga Kerja	Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi
Kerinci	2017	0,28	120538	7,45	5,86
	2018	0,32	127453	7,07	4,93
	2019	0,29	119958	7,13	4,23
	2020	0,28	127187	7,3	3,81
	2021	0,28	130965	7,71	3,89
	2022	0,28	136320	7,57	4,43
	2023	0,3	137302	7,54	5,73
Merangin	2017	0,3	180842	9,43	5,39
	2018	0,35	186724	8,88	4,93
	2019	0,31	186863	8,48	4,25
	2020	0,32	190731	8,63	0,78
	2021	0,29	192138	9,11	5,24
	2022	0,35	193723	8,7	5,72
	2023	0,36	186400	8,9	5,28
Sarolangun	2017	0,36	139970	8,87	4,68
	2018	0,29	135993	8,73	4,8
	2019	0,27	134967	8,45	4,26
	2020	0,31	141752	8,42	-0,25
	2021	0,32	137204	8,87	6,61
	2022	0,3	143965	8,48	6,73
	2023	0,38	136619	8,54	4,02
Tebo	2017	0,27	170293	6,79	5,58
	2018	0,31	174959	6,58	4,98
	2019	0,26	175417	6,47	4,76
	2020	0,3	180517	6,26	-0,03
	2021	0,3	181524	6,68	4,3
	2022	0,3	183165	6,34	6,3
	2023	0,24	177198	6,46	4,5
Bungo	2017	0,34	160485	5,82	5,68
	2018	0,32	172553	5,78	4,65
	2019	0,33	166055	5,6	4,19
	2020	0,31	168517	5,8	-0,48
	2021	0,3	168355	6,23	4,99
	2022	0,32	183631	5,38	4,73
	2023	0,28	185999	5,29	4,66
Sungai Penuh	2017	0,32	41743	2,78	6,02

Kabupaten/Kota	Tahun	Gini Rasio	Tenaga Kerja	Tingkat Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi
	2018	0,3	45298	2,76	4,88
	2019	0,33	40982	2,81	5,01
	2020	0,31	42377	3,03	-0,16
	2021	0,31	43052	3,41	3,67
	2022	0,29	42225	2,97	4,45
	2023	0,31	50136	3,00	4,92

**Pengaruh Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap  
Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota  
Provinsi Jambi Wilayah Timur**

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.228437	(4,27)	0.3222
Cross-section Chi-square	5.852001	4	0.2105

Uji Hausman  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.756296	3	0.8599

Uji Lagrange Multiplier  
Lagrange multiplier (LM) test for panel data  
Date: 05/12/24 Time: 21:05  
Sample: 2019 2023  
Total panel observations: 25  
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.685918 (0.4076)	0.620122 (0.4310)	1.306040 (0.2531)
Honda	-0.828202 (0.7962)	-0.787478 (0.7845)	-1.142458 (0.8734)
King-Wu	-0.828202 (0.7962)	-0.787478 (0.7845)	-1.142458 (0.8734)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

MODEL PLS

Dependent Variable: KP  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/12/24 Time: 22:01  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 5  
 Total panel (balanced) observations: 25

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.194593	0.007900	24.63145	0.0000
TK	3.03E-07	8.67E-08	3.489372	0.0022
KM	0.005821	0.000831	7.008592	0.0000
PE	0.000212	0.000360	0.587639	0.5630
R-squared	0.939032	Mean dependent var	0.276400	
Adjusted R-squared	0.930322	S.D. dependent var	0.022338	
S.E. of regression	0.005897	Akaike info criterion	-7.283251	
Sum squared resid	0.000730	Schwarz criterion	-7.088231	
Log likelihood	95.04064	Hannan-Quinn criter.	-7.229161	
F-statistic	107.8138	Durbin-Watson stat	0.780629	
Prob (F-statistic)	0.000000			

MODEL FEM

Dependent Variable: KP?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/12/24 Time: 21:30  
 Sample: 2017 2023  
 Included observations: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total pool (balanced) observations: 35

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.265261	0.150112	1.767084	0.0885
TK	1.72E-07	5.43E-07	0.315671	0.7547
KM	0.000388	0.011855	0.032690	0.9742
PE	0.002025	0.001893	1.069996	0.2941
Fixed Effects (Cross)				
BATANGHARI	0.004885			
MUAROJAMBI	-0.006550			
TANJABTIM	-0.015414			
TANJABBAR	-0.013989			
KOTAJAMBI	0.031068			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.519401	Mean dependent var	0.306571
Adjusted R-squared	0.394801	S.D. dependent var	0.037569
S.E. of regression	0.029227	Akaike info criterion	-4.029842
Sum squared resid	0.023063	Schwarz criterion	-3.674334
Log likelihood	78.52224	Hannan-Quinn criter.	-3.907121
F-statistic	4.168554	Durbin-Watson stat	2.139544
Prob(F-statistic)	0.003149		

MODEL REM

Dependent Variable: KP?  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/12/24 Time: 21:30  
 Sample: 2017 2023  
 Included observations: 7  
 Cross-sections included: 5  
 Total pool (balanced) observations: 35  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.211967	0.054586	3.883148	0.0005
TK	4.05E-07	1.67E-07	2.421062	0.0215
KM	0.001676	0.003699	0.453225	0.6535
PE	0.002129	0.001733	1.228263	0.2286
Random Effects (Cross)				
BATANGHARI	0.010567			
MUAROJAMBI	-0.003947			
TANJABTIM	-0.002963			
TANJABBAR	-0.009837			
KOTAJAMBI	0.006181			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.016056	0.2318
Idiosyncratic random		0.029227	0.7682

Weighted Statistics			
R-squared	0.230935	Mean dependent var	0.173766
Adjusted R-squared	0.156510	S.D. dependent var	0.030650
S.E. of regression	0.028149	Sum squared resid	0.024563
F-statistic	3.102903	Durbin-Watson stat	2.000352
Prob(F-statistic)	0.040810		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.429900	Mean dependent var	0.306571
Sum squared resid	0.027358	Durbin-Watson stat	1.796004

**Pengaruh Tenaga Kerja, Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap  
Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi  
Wilayah Barat**

Uji chow  
Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	26.317600	(5,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	67.491389	5	0.0000

Uji Hausman  
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	25.567305	3	0.0000

Uji Lagrange Multiplier  
Lagrange multiplier (LM) test for panel data  
Date: 05/12/24 Time: 23:05  
Sample: 2017 2023  
Total panel observations: 42  
Probability in ()

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.836810 (0.3603)	0.809976 (0.3681)	1.646785 (0.1994)
Honda	0.914773 (0.1802)	-0.899987 (0.8159)	0.010456 (0.4958)
King-Wu	0.914773 (0.1802)	-0.899987 (0.8159)	0.068834 (0.4726)
GHM	-- --	-- --	0.836810 (0.3447)

MODEL PLS

Dependent Variable: KP  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 05/12/24 Time: 23:15  
 Sample: 2017 2023  
 Periods included: 7  
 Cross-sections included: 6  
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.419672	0.008446	49.68639	0.0000
TK	-4.55E-07	6.49E-08	-7.002960	0.0000
KM	-8.34E-07	1.58E-07	-5.291414	0.0000
PE	-0.009729	0.001554	-6.259113	0.0000
R-squared	0.937938	Mean dependent var	0.306905	
Adjusted R-squared	0.933038	S.D. dependent var	0.028154	
S.E. of regression	0.007285	Akaike info criterion	-6.915519	
Sum squared resid	0.002017	Schwarz criterion	-6.750026	
Log likelihood	149.2259	Hannan-Quinn criter.	-6.854859	
F-statistic	191.4288	Durbin-Watson stat	0.985994	
Prob(F-statistic)	0.000000			

MODEL FEM

Dependent Variable: KP?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 05/12/24 Time: 23:09  
 Sample: 2017 2023  
 Included observation: 7  
 Cross-sections included: 6  
 Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.143500	0.030815	4.656885	0.0001
TK	2.57E-07	1.36E-07	1.886083	0.0681
KM	0.015127	0.001480	10.21892	0.0000
PE	-0.001060	0.000894	-1.185933	0.2441
Fixed Effects				
(Cross)				
KERINCI	0.027764			
MERANGIN	-0.014638			
SAROLANGUN	-0.027216			
TEBO	0.000711			
BUNGO	0.007257			
SUNGAIPENUH	0.006122			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.944669	Mean dependent var	0.283571
Adjusted R-squared	0.931256	S.D. dependent var	0.018455
S.E. of regression	0.004839	Akaike info criterion	-7.636903
Sum squared resid	0.000773	Schwarz criterion	-7.264546
Log likelihood	169.3750	Hannan-Quinn criter.	-7.500420
F-statistic	70.42695	Durbin-Watson stat	1.283337
Prob (F-statistic)	0.000000		

MODEL REM

Dependent Variable: KP?  
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)  
 Date: 05/12/24 Time: 23:11  
 Sample: 2017 2023  
 Included observations: 7  
 Cross-sections included: 6  
 Total pool (balanced) observations: 42  
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.204525	0.017905	11.42272	0.0000
TK	7.52E-08	7.50E-08	1.002828	0.3223
KM	0.011132	0.001061	10.49509	0.0000
PE	-0.001892	0.000867	-2.183255	0.0353
Random Effects (Cross)				
KERINCI	0.009730			
MERANGIN	-0.013503			
SAROLANGUN	-0.015227			
TEBO	0.001825			
BUNGO	0.008712			
SUNGAIPENUH	0.008463			

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.006018	0.6074
Idiosyncratic random		0.004839	0.3926

Weighted Statistics			
R-squared	0.761298	Mean dependent var	0.082449
Adjusted R-squared	0.742453	S.D. dependent var	0.012037
S.E. of regression	0.006109	Sum squared resid	0.001418
F-statistic	40.39810	Durbin-Watson stat	0.830097
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.537207	Mean dependent var	0.283571
Sum squared resid	0.006463	Durbin-Watson stat	0.182151